



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU (LKj – IP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau tahun empat dalam masa RPJMD Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana analisa dan evaluasi agar kinerja ke depan dapat tercapai dengan baik, efektif, efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.



Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kabupaten Berau Tahun 2024, khususnya Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Redeb, Maret 2025

BUPATI BERAU,



Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai konsekuensi logis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang berorientasi kan pada kepentingan masyarakat luas, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabel serta mempunyai wawasan jauh ke depan, pengukuran kinerja instansi pemerintah mutlak diperlukan guna mengetahui tingkat capaian yang diperoleh dari misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pencapaian Kinerja yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai parameter penilaian, adalah merupakan gambaran tingkat keberhasilan/ kegagalan dari misi organisasi. Sehingga hasil yang diperoleh tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan menggunakan beberapa parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. **Misi Pertama:** yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (indikator) indikator kinerja dengan capaian persentase rata-rata sebesar 109,99 persen yang telah dicapai dalam tahun 2024. Dengan capaian kinerja memperoleh nilai/predikat sangat baik.
2. **Misi Kedua:** yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal dengan menetapkan 2 (dua) Tujuan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024. Dengan nilai



capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik. Dengan nilai capaian persentase rata-rata adalah 114,04 persen.

3. **Misi Ketiga** ; yaitu Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan telah ditetapkan 2 (dua) tujuan 3 (tiga) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian persentase rata-rata adalah 164,23 persen.
4. **Misi Keempat** ; yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian persentase rata-rata adalah 93,75 persen. Akan tetapi ada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang di inginkan dengan capaian rata – rata 100%, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Berau.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran dengan 25 (dua puluh enam) indikator sasaran dan mengacu pada 4 (empat) misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2024. Dari uraian di atas maka capaian sasaran dalam visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- ❖ Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 6 indikator kinerja.
- ❖ Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja.
- ❖ Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- ❖ 13 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama.



Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14,47	13,37	92,39	Baik
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	9,98	9,57	95,89	Baik
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72,49	73,66	101,53	Baik Sekali
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	66,60	100	150,15	Baik Sekali
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,62	5,15	88	Baik
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4,95	5,08	97	Baik
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,00	3,50	175	Baik Sekali
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1,00	1,17	117	Baik Sekali
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9	Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	11,94	12,42	104	Baik Sekali
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	83	85,7	103,25	Baik Sekali
9	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	67,50	69,97	103,66	Baik Sekali
		12	Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	11,70	81,49	696,5	Baik Sekali
		13	Capaian akses air minum layak	Persentase	90	83,17	92,41	Baik
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	23	32,97	143,54	Baik Sekali
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,74	99,60	99	Baik
		16	Rasio rumah layak huni	Persentase	0,198	0,207	105	Baik Sekali
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	0,65	0,6	92	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,8	162	Baik Sekali
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59	59,96	100,65	Baik Sekali
		20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,27	91,61	106,18	Baik Sekali
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804	94,85	105,61	Baik Sekali
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*	Baik
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	68 (B)	62,74	92	Baik
		24	Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kab.Berau	Status	Tinggi (3,41)	3,1964*	93*	Baik
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/ nilai	94,06 (A)	85	90	Baik
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja							132,23	Baik Sekali

Rata-rata capaian kinerja adalah **132,23%** dalam kriteria penilaian **“Baik Sekali”**, namun dari hasil pengukuran kinerja masih terdapat beberapa kekurangan yang ditunjukkan dengan capaian kinerja di bawah seratus persen. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk menjadi perhatian guna upaya perbaikan di tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Berau	2
1.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Berau	4
1.5. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Berau	7
1.6. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Berau	10
1.6.1. Aspek Geografi	10
1.6.2. Aspek Demografis.....	12
1.7. Pertumbuhan Ekonomi	13
1.8. Alur Pikir Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Berau	17
2.1.1. Visi.....	18
2.1.2. Misi	21
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	25
2.1.4. Strategi.....	31
2.1.5. Program Pembangunan Daerah.....	37



2.1.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	50
2.2. Indikator Kinerja Utama	52
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	57
2.4. Perjanjian Kinerja.....	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	62
3.1. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	63
3.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	69
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.....	69
3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	76
3.5.Realisai Anggaran.....	154
BAB IV PENUTUP	167



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	7
Tabel 1.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Golongan Tahun 2024	8
Tabel 1.3 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Eselon Tahun 2024	8
Tabel 1.4 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Agama Tahun 2024	9
Tabel 1.5 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Usia Tahun 2024	9
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024	12
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2019-2024	14
Tabel 2.1 Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Berau 2021-2026	28
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kab.Berau Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.3 Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah	39
Tabel 2.4 Misi, Sasaran dan Program yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah	43
Tabel 2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau	50



Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	52
Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2024	57
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024	59
Tabel 3.1 Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Berau 2022-2024.....	63
Tabel 3. 2 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Berau 20223-2024	64
Tabel 3.3 Kategori penilaian peringkat	70
Tabel 3.4 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024.....	71
Tabel 3.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja	74
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Utama	74
Tabel 3.7 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	75
Tabel 3.8 Daftar UMKM Kab.Berau Tahun 2020-2024	91
Tabel 3.9 Rekap Data Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 2024	92
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	154
Tabel 3.11 Program Unggulan Bupati.....	157
Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	160



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 4 Laporan Keuangan Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik. Dalam upaya perbaikan peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melibatkan seluruh pihak baik pihak



Pemerintah Daerah itu sendiri, pihak swasta, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Berau 2021-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini adalah sebagai pertanggungjawaban seluruh perangkat Daerah khususnya bagi organisasi yang mempunyai target daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan pemerintah di Kabupaten Berau dan sarana dalam upaya evaluasi peningkatan kinerja yang lebih baik, dimana dalam Laporan Kinerja harus memberikan gambaran dalam melakukan identifikasi keberhasilan dan kendala tidak tercapainya suatu tujuan serta memberikan upaya solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di organisasi tersebut. Hal ini merupakan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

1.3. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Menurut sejarah Raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Surya Natakesuma dan isterinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahan kerajaan pada awalnya berkedudukan di Sungai Lati.

Aji Raden Suryanata Kesuma menjalankan masa pemerintahan tahun 1400-1432 pada masa itu berhasil menyatukan wilayah pemukiman masyarakat Berau yang disebut Banua, yaitu Banua Merancang, Banua Pantai, Banua Kuran, Banua Rantau Buyut dan Banua Rantau Sewakung.



Setelah beliau wafat, pemerintahan Kesultanan Berau dilanjutkan oleh putranya dan selanjutnya secara turun temurun memerintah sampai abad ke 17. Kemudian awal abad ke 18 penjajah Belanda memasuki kerajaan Berau dengan berkedok sebagai pedagang. Namun kegiatan itu dilakukan politik *De Vide Et Impera* (politik adu domba). Sehingga kerajaan terpecah menjadi 2 Kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur.

Pada saat bersamaan masuk ajaran agama islam ke Berau yang dibawa oleh imam Sambuayan dengan pusat penyebaran di sekitar Sukan. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar Alimuddin (1800-1852). Raja Alam terkenal pimpinan yang gigih menentang penjajah belanda. Sedangkan kesultanan Gunung Tabur sebagai sultan pertamanya adalah Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800-1833), keturunnya meneruskan pemerintahan hingga kepada sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin (wafat 15 April 1951) dan Sultan terakhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub (1951-1960). Kemudian wilayah kesultanan tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Berau.

Sultan Muhammad Aminuddin menjadi Kepala Daerah Istimewa Berau, Beliau memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu Undang-undang Darurat tahun 1953 Tanggal terbitnya Undang-undang tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 1959, Daerah Istimewa Berau berubah menjadi Kabupaten Dati II Berau dan Tanjung Redeb sebagai Ibukotanya, dengan Sultan Aji Raden Muhammad Ayub (1960-1964) menjadi Bupati Kepala Daerah Tk.II Berau yang pertama.

Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau. Dimana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September Tahun 1810 itu menjadi cikal bakal



berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu kemudian diabadikan sebagai hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 3 tanggal 2 April 1992.

1.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 8. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



9. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah daratan);
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
16. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
21. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;



e. Badan Daerah Terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana;

f. Kecamatan terdiri atas :

1. Kecamatan Batu Putih dengan Tipe A;
2. Kecamatan Biatan dengan Tipe A;
3. Kecamatan Biduk-Biduk dengan Tipe A;
4. Kecamatan Gunung Tabur dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelay dengan Tipe A;
6. Kecamatan Maratua dengan Tipe A;
7. Kecamatan Pulau Derawan dengan Tipe A;
8. Kecamatan Sambaliung dengan Tipe A;
9. Kecamatan Segah dengan Tipe A;
10. Kecamatan Tabalar dengan Tipe A;
11. Kecamatan Talisayan dengan Tipe A;
12. Kecamatan Tanjung Redeb dengan Tipe A;
13. Kecamatan Teluk Bayur dengan Tipe A;

g. Kelurahan terdiri dari :

1. Kelurahan Tanjung Redeb
2. Kelurahan Gunung Tabur
3. Kelurahan Sambaliung



4. Kelurahan Teluk Bayur
5. Kelurahan Gayam
6. Kelurahan Rinding
7. Kelurahan Gunung Panjang
8. Kelurahan Bedungun
9. Kelurahan Karang Ambun
10. Kelurahan Bugis

1.5. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memiliki SDM yang cukup beragam, jumlah Aparatur Sipil Negara Se-Kabupaten Berau Tahun 2024 sebanyak 6.254 sedangkan tahun 2023 sebanyak 4.716 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara, SDM Kabupaten Berau berpendidikan S3 ada 1 orang, berpendidikan S2 sebanyak 462 orang (laki-laki 233 dan perempuan 229 orang), berpendidikan S1 berjumlah 3.545 (laki-laki 1.464 orang dan perempuan 2.081 orang), berpendidikan DIV//DIII/DII/DI berjumlah 1,258 (laki-laki 423 orang dan perempuan 835 orang), berpendidikan SLTA/SLTP dan SD berjumlah 988 orang (laki-laki 734 orang dan perempuan 254 orang).

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Pendidikan	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S.3	1	0	1
2	S.2	233	229	462
3	S.1	1464	2081	3545
4	D.IV	43	26	69
6	D.III	332	768	1100



7	D.II	41	35	76
8	D.I	7	6	13
9	SLTA	645	239	884
10	SLTP	62	8	70
11	SD	27	7	34
	JUMLAH	2855	3399	6254

Sumber Data Per 21 Januari 2025 BKPP Kab.Berau

Tabel 1.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	275	231	506
2	III	1540	1694	3234
3	II	453	312	765
4	I	32	9	41
5	X	33	49	82
6	IX	431	798	1229
7	VII	89	303	392
8	V	2	3	5
	JUMLAH	2855	3399	6254

Sumber Data Per 21 Januari 2025 BKPP Kab.Berau

Tabel 1.3 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Eselon Tahun 2024

No	Eselon	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	26	9	35
2	III	125	46	171
3	IV	220	108	328
4	Fungsional	1536	2728	4264
5	Non eselon	948	508	1456
	JUMLAH	2855	3399	6254

Sumber Data Per 21 Januari 2025 BKPP Kab.Berau



**Tabel 1.4 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau
berdasarkan Agama Tahun 2024**

No	Agama	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	2568	2898	5466
2	Kristen Protestan	84	116	200
3	Kristen Katholik	190	377	567
4	Hindu	8	8	16
5	Budha	4	0	4
6	Konghucu	1	0	1
	JUMLAH	2855	3399	6254

Sumber Data Per 21 Januari 2025 BKPP Kab.Berau

**Tabel 1.5 Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau
berdasarkan Usia Tahun 2024**

No	Usia	GENDER		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	55-60	450	273	723
2	50-54	514	466	980
3	45-49	562	505	1067
4	40-44	538	682	1220
5	35-39	296	590	886
6	30-34	361	624	985
7	25-29	122	251	373
8	20-24	12	8	20
	JUMLAH	2855	3399	6254

Sumber Data Per 21 Januari 2025 BKPP Kab.Berau



1.6. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Berau

1.6.1. Aspek Geografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi spasial dan mendasar dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Berau. Penjabaran aspek geografi dalam dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Berau baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Adapun, aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Secara astronomis Kabupaten Berau terletak antara 116° Bujur Timur sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2 33' Lintang Selatan. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,17 Km² yang terdiri dari daratan 23.558,50 Km² dan lautan 10.568,85 Km² sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Jika dilihat dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Berdasarkan posisi geografis, batas wilayah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- ❖ Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan;
- ❖ Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
- ❖ Wilayah Timur dibatasi oleh Laut Sulawesi; dan



- ❖ Wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dengan potensi sumber daya alam yang tidak terbaharui cukup besar yakni berupa batu bara. Selain itu, terdapat potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Delapan kecamatan di Kabupaten Berau memiliki wilayah pesisir yaitu Kecamatan Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan lepas. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua sudah dikenal secara internasional sebagai daerah dan tujuan wisata dimana pantai dan alam bawah lautnya memiliki panorama yang indah. Di samping itu, Kabupaten Berau juga memiliki 31 pulau kecil dan wilayah laut yang cukup luas dengan keanekaragaman sumber daya hayati yang tinggi.

A. Topografi

Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan Kabupaten Berau lebih banyak berbentuk gugusan bukit yang sebagian besar tidak dihuni oleh penduduk sehingga rata-rata kecamatan memiliki wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang minim. Wilayah daratan tidak lepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur hampir mencapai 100 Km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dengan bukit tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan Kabupaten Berau memiliki tujuh buah danau yang secara total memiliki luas kurang lebih 15 Ha.



B. Hidrologi

Di Kabupaten Berau terdapat enam kecamatan yang dialiri oleh sungai dimana jumlah sungai secara total mencapai 20 aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Berau yang berada di Kecamatan Gunung Tabur dengan panjang mencapai 292km dan Sungai Kelay di Kecamatan Kelay sepanjang 254km.

1.6.2. Aspek Demografis

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 288.943 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 272.887 jiwa bertambah 16.056 jiwa. Penambahan ini terjadi karena angka kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan angka kematian. Kecamatan Tanjung Redeb merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian tentunya berada di kecamatan ini.

**Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Berau
Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelay	5.881	6.352	6.807	7.225	7,637
2	Talisayan	14.823	15.980	16.637	17.020	17,557
3	Sambaliung	38.982	41.226	43.161	44.532	45,801
4	Segah	13.969	15.434	16.647	17.942	18,837
5	Tanjung Redeb	72.869	73.625	74.137	74.976	76,511



6	Gunung Tabur	26.357	28.270	30.040	31.394	32,297
7	Pulau Derawan	12.246	13.172	13.924	14.399	14,804
8	Biduk-Biduk	7.044	7.455	7.594	7.733	7,855
9	Teluk Bayur	31.526	32.746	33.835	34.960	35,934
10	Tabalar	7.329	7.451	7.756	7.917	8,227
11	Maratua	3.776	3.834	3.983	3.881	3,902
12	Batu Putih	8.471	8.831	9.209	9.519	9,814
13	Biatan	7.507	8.166	8.747	9.157	9,767
Total		232.189	251.439	263.150	272.887	288.943

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Berau per 31 Januari 2025

Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Berau memiliki ketimpangan yang sangat tinggi. Ketimpangan kepadatan penduduk ini terjadi dikarenakan distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan dimana pada daerah pedalaman/terpencil pasti hanya memiliki jumlah penduduk yang sedikit jika dibandingkan wilayah yang lebih maju padahal daerah pedalaman/terpencil tersebut memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar daripada wilayah maju tersebut.

1.7. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi dalam menganalisis perkembangan dan pembangunan ekonomi adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dimana perekonomian di Kabupaten Berau pertumbuhan ekonomi yang cenderung berfluktuatif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat perkembangan suatu perekonomian akibat penambahan kuantitas yang diproduksi dan bukan karena perubahan harga. Dalam pengertian makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan nilai PDRB yang ditunjukkan oleh perubahan nilai total PDRB tahun sebelumnya.



Pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau yaitu 7,28 persen. Semua lapangan usaha di Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen.

Adapun rincian adalah sebagai berikut Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Berau (persen) 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Berau Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,72	11,73	9,33	11,26	12,42
B	Pertambangan dan Penggalian	56,28	59,68	66,98	58,27	53,08
C	Industri Pengolahan	4,78	4,32	3,49	4,33	4,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,16	3,74	3,36	4,47	5,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,53	5,72	4,99	6,48	7,23
H	Transportasi dan Pergudangan	6,14	5,41	4,47	5,91	6,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,04	0,81	1,02	1,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	0,95	0,72	0,90	0,99



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,60	0,50	0,41	0,53	0,6
L	Real Estate	0,99	0,83	0,62	0,74	0,79
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,09	0,07	0,09	0,11
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,03	0,80	1,03	1,35
P	Jasa Pendidikan	3,03	2,77	2,22	2,76	3,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,37	1,10	1,38	1,50
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,79	0,71	0,57	0,73	0,85
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Berita resmi statistik 28 Februari 2025

*) angka sementara

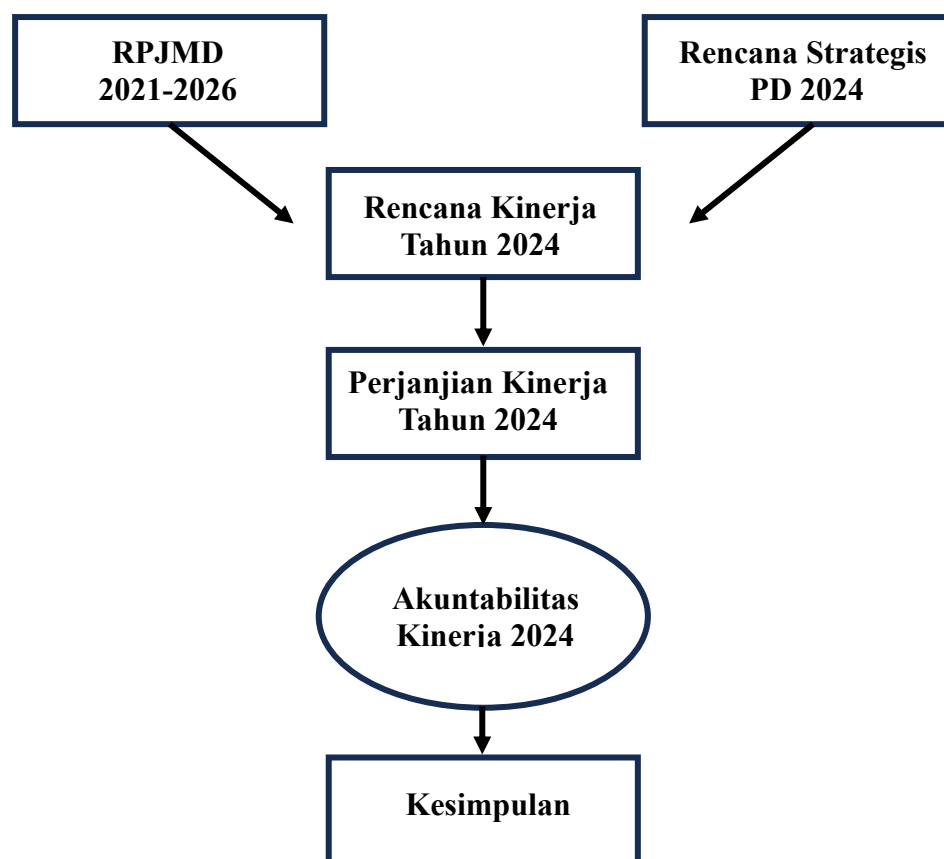
**) angka sangat sementara



1.8. Alur Pikir Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau selama tahun 2024, capaian kinerja (*performance result*) 2024 diperbandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja masa datang. Alur pikir penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Berau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Pemerintah Kabupaten Berau untuk periode 5 tahun. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, rencana pembangunan dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan oleh pemerintah pusat dan daerah yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk periode 2021-2026 RPJMD telah Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai Kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah, RPJMD Kabupaten sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang strategis di Kabupaten Berau, termasuk dalam perencanaan tahunan.



2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan,



pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Maju: Maju adalah suatu kondisi dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang saat ini. Berau yang maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.

Sejahtera: Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan



masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.

**Sumber Daya
Manusia Yang
Handal:**

Sumber daya manusia (SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026, maka sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai fondasi dan keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan.

**Transformasi
Ekonomi
Dalam
Pengelolaan
Sumber Daya**

Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kab.Berau selama ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Berau. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan di sektor



Alam Secara Berkelanjutan: Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan seperti Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM.

Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumber daya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia di masa mendatang.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan



dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka indeks pembangunan manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang dan sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*unite nation development progammer UNDP*)

Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2. Misi Kedua: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.



Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), khususnya di sektor Perkembangan dan Penggalan secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan (*renewable resources*), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3. Misi Ketiga: Meningkatnya sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien ke dan dari Kabupaten Berau. Di samping itu, telekomunikasi. Listrik dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan



infrastruktur akan mendatang terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semakin penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat ini dan terlebih lagi di masa akan mendatang, ekonomi digital dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus mengantisipasi tantangan pembangunan di era digital ini, dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampir ke semua jenis usaha.

4. Misi Keempat: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan,



izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.**
- Tujuan : Mewujudkan masyarakat Berau yang berdaya saing.
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan.
- Misi Kedua : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan**



perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mantap dan berdaya saing.

Sasaran 1 : Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau.

Sasaran 2 : Menurunnya angka kemiskinan.

Tujuan Kedua : Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism*.

Sasaran 3 : Meningkatnya produksi sektor primer.

Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan.

Misi Ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.

Tujuan Pertama : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya koneksitas antar wilayah.

Tujuan Kedua : Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi Keempat : Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.



Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah.

Sasaran pembangunan daerah secara spesifik terangkai menjadi sebuah arsitektur kinerja berupa “*impact*” yang saling terhubung di mana indikator tujuan merupakan *lagging* indikator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading* indikator. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode .



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Tabel 2. 1 Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Berau 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia Meningkat dari 74,71 Menjadi 76,69 Di akhir periode	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53	14,10	14,29	14,47	14,65	14,83	14,83
					Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	9,70	9,84	9,98	10,12	10,26	10,26
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	72,28	72,38	72,49	72,60	72,71	72,71
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70%	29,60%	44,90%	66,60%	99,90%	100,00%	100,00%
2	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi meningkat dari -3,35% menjadi 5,29% di akhir periode	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41	4,41
				Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84	4,84
		Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	PDRB Per Kapita meningkat dari 148,9 Juta/tahun menjadi 164,848 juta/tahun di akhir periode	Meningkatnya Industri Kecil dan menengah (IKM)	Persentase Usaha mikro dan kecil	24,00%	0,00%	6,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	40,00%
				Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	na	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,03
				Meningkatnya Produksi Sektor Primer	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09	12,09
				Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	80	82	83	84,1	85,1	85,1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Gini Menurun dari 0,300 Menjadi 0,280 di akhir periode	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	68,50
					Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20%	10,70%	11,20%	11,70%	12,70%	13,70%	13,70%
					Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	79,00	83,00	86,00	90,00	93,00	97,00	97,00
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%	13,00%	21,00%	23,00%	25,00%	30,00%	33,00%
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,84	99,94	99,94
					Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,2	0,2
					Meningkatnya konektivitas antar wilayah	39	50	55	60	65	70	75	75
					Indeks SPBE	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
		Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Emisi Gas Rumah Kaca Menurun dari 416.564 menjadi 342.901 di akhir periode	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79	56,79
					Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	85,87	85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,784	89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814	89,814



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari CC (53,25) menjadi BB (76) di akhir periode	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	BB (72)	BB (72)
					Status Kinerja Penyelenggaraann Pemerintahan Daerah kab. Berau	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	A (90,12)	A (92,16)	A (94,06)	A (96,26)	A (98)
	4	6	6	13	25								

Sumber Baplitbang RPJMD 2021-2026



2.1.4. Strategi

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026. Strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai. Rumusan strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Kabupaten Berau periode 2021-2026.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Tabel 2. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kab.Berau Tahun 2021-2026

Visi: "Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur		
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan, dilakukan melalui: 1. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif. 2. Peningkatan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 3. Pengembangan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan di Kab. Berau akan dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 3. Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan 4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 5. Meningkatkan status akreditasi Puskesmas menjadi akreditasi Utama 6. Memberikan dukungan penuh terhadap penanganan pandemi covid 19
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal		
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	Upaya menurunkan angka pengangguran di Kab. Berau akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Visi:
"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
mantap dan berdaya saing		3. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan Industrial yang harmonis, optimalisasijaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;
		4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlanter termasukwarga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan;
		2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yangmaju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak COVID-19;
		3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembanganindustri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan wirausahawan;
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui programekonomi kerakyatan	Meningkatnya IndustriKecil dan Menengah (IKM)	4. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.
		Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui:
		1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatanmasyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM;
		2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM;
		3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.
	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	Upaya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i> akan dilakukan melalui: 1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelakuuusaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Visi:
"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3. Menyiapkan sumber daya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata. Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pemberian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 2. Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.
	Meningkatnya produksi sektor primer	Upaya peningkatan produksi sektor primer akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak; 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas; 3. Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Visi:
"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5. Pengembangan dan penguatan kemitraan yang ideal antar petani/pekebun dengan swasta, termasuk di dalamnya penyuluhan, penerapan <i>good agriculture practices</i> dan meningkatkan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan;
		6. Peningkatan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan;
		7. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna;
		8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keragaman konsumsi pangan, akan dilakukan melalui upaya:
		1. Meningkatkan diversifikasi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
		2. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani;
		3. Melakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap daerah rawan pangan; dan
		4. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan.
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan		
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya Kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Upaya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar akan dilakukan melalui:
		1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
		2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah;
		3. Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
		4. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
		5. Peningkatan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
		6. Peningkatan pelayanan jaringan air minum;
		7. Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu;
		8. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase;
		9. Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;
		10. Mengurangi luasan lahan kumuh;
		11. Mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dari berbagai <i>stakeholder</i> ;
		12. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, dan
		13. Memaksimalkan tugas dan fungsi POKJA PKP dan Forum PKP Kabupaten Berau dalam mendukung kebijakan pengurangan luasan Kawasan kumuh.
		Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah akan dilakukan melalui:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Visi: "Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; dan 3. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah.
Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Upaya meningkatkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan dilakukan melalui: 1. Pengawasan dan pengendalian, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas berbagai kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup; 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, meliputi pengembangan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3); 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 5. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 6. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 7. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 8. Optimalisasi upaya pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pihak swasta.
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui: 1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat; 3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan 2. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutamanya dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi.



2.1.5. Program Pembangunan Daerah

A. Program Prioritas I : Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Pemenuhan kewajiban belanja modal transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d) Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

B. Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2021-2026, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki 18 janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau. 18 janji kampanye tersebut antara lain:



- 1) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP;
- 2) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT;
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis;
- 4) Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu;
- 5) Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 6) Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung;
- 7) Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota;
- 8) Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu;
- 9) Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD);
- 10) Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung;
- 11) Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amfiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat;
- 12) Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19;
- 13) Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain);
- 14) Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi;
- 15) Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata;
- 16) Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM;



- 17) Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi;
- 18) Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes



5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop



11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
16	Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskoperindag
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian,



17	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
18	Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Kawasan Pemukiman	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

Program-program pembangunan Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan dua puluh enam (26) urusan wajib dan delapan (8) urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, di samping untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra Perangkat Daerah yang antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat. Program-program ini, dalam perumusannya, dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.

➤ **Program-program pembangunan tersebut adalah:**

Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, sebagai berikut:



Tabel 2.4 Misi, Sasaran dan Program yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Misi	Sasaran	Program Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah		Pengampu Program
Misi Ke I					
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		8		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rsud Abdul Rivai
		9		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan



				Keluarga Sejahtera (KS)	Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi Ke II					
2	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal	3. Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			12	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4. Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			14	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah
			18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		5. Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			20	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



			21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		6. Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			26	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			28	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		7. Meningkatkan Produksi Sektor Primer	29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan



			32	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan
			33	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
			34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			37	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			38	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		8. Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
			43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan



			44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
Misi Ke III					
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan	9. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			48	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			49	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			50	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			51	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			52	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pertanahan



		10. Meningkatkan a konektivitas antar wilayah	55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			56	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			57	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		11. Meningkatny a Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	58	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			60	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi Ke IV					
4	Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel	12. Meningkatn ya akuntabilita s kinerja dan keuangan daerah	61	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	62		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	63		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
	64		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
	65		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	



			66	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			67	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			68	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
			70	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
			71	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		13. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			74	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			75	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
			76	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



2.1.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan timur bersama ini sasarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau

No.	Prioritas Sasaran	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1. Harapan lama sekolah
		2. Rata-rata lama sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3. Angka harapan hidup
		4. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5. Tingkat Pengangguran terbuka
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7. Persentase Usaha mikro dan kecil
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10. Score pola pangan harapan
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
		12. Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan
		13. Capaian Akses Air Minum Layak
		14. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		15. Persentase rumah tangga pengguna listrik
		16. Rasio rumah layak huni
10	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	17. Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten
		18. Indeks SPBE
11	Meningkatnya Kualitas, Daya	19. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air



	Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	20. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara
		21. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22. Opini BPK
		23. Nilai/Predikat AKIP
		24. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25. Survei Kepuasan Masyarakat



2.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
Misi I						
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sejahtera, Dan Berbudi Luhur						
Tujuan 1 Mewujudkan Masyarakat Berau yang Berdaya Saing						
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1.Harapan lama sekolah	Tahun	$EYS_a^t = FKx \sum_{i=0}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ $EYS_a^t = \text{Harapan lama sekolah pada umur } a \text{ di tahun } t$ $E_i^t = \text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang bersekolah pada tahun } t$ $P_i^t = \text{Jumlah penduduk usia } i \text{ pada tahun } t$ I = Usia (a,a+1,...,n) FK = Faktor Koreksi	BPS	Dinas Pendidikan
		2.Rata-rata lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Xi = lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3. Angka harapan hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	Dinas Kesehatan
		4. Proporsi peserta jaminan kesehatahn melalui SJSN bidang kesehatan	Persen	Jumlah peserta jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100%	BPJS	Dinas Kesehatan
MISI II						
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Optimalisasi Sektor Hilir Sumber Daya Alam dan Pertanian dalam Arti Luas yang Berbasis Kerakyatan dengan Perluasan Lapangan Kerja dan Pengembangan usaha Berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal						
Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat yang mantap dan berdaya saing						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

3	Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau	5. Tingkat pengangguran terbuka	Persen	Jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja x 100%	BPS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Menurunnya angka kemiskinan	6. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	GK = GKM + GKNM Ket: GK = Garis Kemiskinan GKM = Garis Kemiskinan Makanan GKNM = Garis Kemiskinan non makanan	BPS	Dinas Sosial
Tujuan 3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan						
5	Meningkatnya industri kecil dan menengah (IKM)	7. Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	$\frac{(\text{Jumlah UMKM tahun } N - \text{Jumlah UMKM tahun } N - 1)}{\text{Jumlah UMKM tahun } N} \times 100\%$	Data UMKM Diskoperindag	Diskoperindag
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism	8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB Total}} \times 100\%$	BPS	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$\frac{\text{Nilai PDRB Sub Sektor Pertanian dalam arti luas (pertanian dan peternakan, perikanan dan perkebunan)}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	BPS	Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, dinas perkebunan, dinas perikanan
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10. Score pola pangan harapan	Score	Skor PPH = Skor PPH Kelp padi-padian + umbi-umbian + Kacang-kacangan + Kelompok pangan lainnya	Bidang konsumsi dan panganekaragaman	Dinas Pangan
MISI III						
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan						
Tujuan 4 Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah						
9	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	11. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Bid Pembangunan jalan dan jembatan	DPUPR
		12. Capaian akses air minum jaringan perpipaan	persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabuapten/kota}} \times 100\%$	Bid air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman	DPUPR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		13. Capaian akses air minum layak	persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga disekuruh kabuapten/kota}} \times 100\%$	Bid air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman	DPUPR
		14. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	$\frac{\text{Luar irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{luar irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Bidan sumber daya air	DPUPR
		15. Rasio rumah layak huni	persen	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang perumahan	DISPERKIM
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	16. Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	$\frac{((\text{Jmlah trayek yang dilayani pada kabupaten kota} \times \text{bobot trayek} \times \text{Jumlah kebutuhan trayek pada kab kota tersebut} \times \text{bobot angkutan jalan} + \text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kab kota tsb} \times \text{bobot lintas} \times \text{Jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada kab kota} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan})}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada kab kota} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan}} \times 100\%$	Bidang angkutan	Dinas Perhubungan
		17. Indeks SPBE	Indeks	Formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Secara garis besar pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh tim assessor baik internal dan eksternal dengan melakukan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, penilaian visitasi	Bidang penyelenggaraan e-government	Dinas komunikasi dan informatika
Tujuan 5 Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup						
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	18. Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	- Melakukan pemantauan kualitas air sungai - Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) - Setiap titik akan memiliki indeks pencemaran air melalui persamaan $IPJ = \frac{\sqrt{C_i^2 / L_{ij}^2 M + (C_i / L_{ij}^2 R)}}{2}$ L_{ij} = Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j = Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ = (C_i / L_{ij}, C₂ / L_{2j},....) (C_i/L_{ij}) maksimum = nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij}) Rata-rata = nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij} - Mentransformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen.	Bidang Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan	DLHK



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		19. Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	Nilai IKU merupakan hasil rata-rata dari IKU kabupaten/kota pada wilayah administrasinya. $IKU = 100 - \frac{[50 (Isu - 0,1)]}{0,9}$ $ISU = \frac{Indeks NO2 + Indeks SO2}{2}$ $Indeks NO2 = \frac{Rata-rata NO2}{Baku Mutu Eu}$ $Indeks SO2 = \frac{Rata-rata SO2}{Baku Mutu Eu}$ Rata-rata NO2 = Rerata hasil pengukuran No2 dari 4 lokasi Rata-rata SO2 = Rerata hasil pengukuran SO2 dari 4 lokasi	Bidang Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan	DLHK
		20. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	$IKTL = \frac{100 - [(84,3 - (TTL \times 100)) \times 50]}{54,3}$ IKTL = Indeks kualitas tutupan lahan TL = Tutupan lahan $TL = \frac{LTL}{LW}$ LTL = Luas tutupan lahan LW = Luas wilayah kabupaten	Bidang Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan	DLHK
MISI IV						
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel						
Tujuan 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi						
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	21. Opini BPK	Opini	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 4 yaitu: 1. Wajar tanpa pengecualian WTP yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. 2. Wajar dengan pengecualian WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian	Hasil evaluasi BPK	BPKAD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

				3. Tidak memberikan pendapat atau disclaimer yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak meyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak 4. Tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya		
		22. Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	SAKIP = Komponen bobot perencanaan kinerja + pengukuran kinerja + pelaporan kinerja + evaluasi akuntabilitas kinerja internal Penjelasan formulasi : SAKIP dimana sistem ini merupakan integrasi dari dokumen perencanaan kinerja 30%, dokumen pengukuran kinerja 30%, dokumen pelaporan kinerja 15%, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	Hasil evaluasi kementerian PANRB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		23. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kab.berau	Status	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro: $KPPD = [(CKM+CKUP) \times 0,75] + [PKM \times 0,25]$ Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh, disusun rangking dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Penetapan status kinerja dikelompokkan dalam 5 kategori: Skor 1.00-1.80 = status kinerja sangat rendah Skor 1.81-2.60 = status kinerja rendah Skor 2.61-3.40 = status kinerja sedang Skor 3.41-4.20 = status kinerja tinggi Skor 4.21-5.00 = status kinerja sangat tinggi Permendagri 28 Tahun 2020 BAB IV	Hasil evaluasi Kemendagri	Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	24. Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/nilai	Hasil survei kepuasan masyarakat sesuai peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil survei kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2024 Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14,47
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	9,98
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72,49
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	66,60
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,62
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4,95
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,00
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1,00
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9	Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	11,94
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	83



9	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	67,50
		12	Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	11,70
		13	Capaian akses air minum layak	Persentase	90
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	23
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,74
		16	Rasio rumah layak huni	Persentase	0,198
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	65
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59
		20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,27
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	68 (B)
		24	Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kab.Berau	Status	Tinggi (3,41)
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/nilai	94,06 (A)

2.4. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Dengan adanya perjanjian kinerja maka diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2024 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Berau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	PD Pengampu
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14,47	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	9,98	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72,49	Dinas Kesehatan
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	66,60	Dinas Kesehatan
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,62	Disnakertrans
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4,95	Dinas Sosial
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,00	Diskoperindag
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1,00	Disbudpar
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9	Kontribusi Sektor pertanian,	Persentase	11,94	Dinas Pertanian dan Peternakan ,Dinas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj-IP)
Tahun 2024

			kehutanan dan perikanan			Perikanan dan Dinas Perkebunan
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	83	Dinas Pangan
9	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	67,50	DPUPR
		12	Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	11,70	DPUPR
		13	Capaian akses air minum layak	Persentase	90	DPUPR
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	23	DPUPR
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,74	DPUPR
		16	Rasio rumah layak huni	Persentase	0,198	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	65	Dinas Perhubungan
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	Diskominfo
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59	DLHK
		20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,27	DLHK
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804	DLHK
12	Meningkatnya akuntabilitas	22	Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	68 (B)	Bagian Organisasi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj-IP)
Tahun 2024

	kinerja dan keuangan daerah	24	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab.Berau	Status	Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/ nilai	94,06 (A)	Bagian Organisasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Berau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan kinerja Tahun Keempat dari RPJMD 2021-2026 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dimana Perjanjian Kinerja Kabupaten Berau Tahun 2024. Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target tingkat capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Berau Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan informasi yang akuntabel dan transparan dalam pertanggungjawaban dana yang telah digunakan dan untuk memastikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kepada publik telah



dicapai, untuk dapat mengukur pencapaian kinerja maka dilakukan pengumpulan data dan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan-keberhasilan atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kriteria Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

- ❖ Langsung
- ❖ Obyektif
- ❖ Kuantitatif
- ❖ Terinci
- ❖ Praktis
- ❖ Dapat Diyakini
- ❖ Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran sasaran.

3.1. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau atas implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya, dengan rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Berau 2022-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan / Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,42	22,54	0,34%
2	Pengukuran Kinerja	30	17,66	17,94	18,02	0,36%



3	Pelaporan Kinerja	15	9,96	10,06	10,20	0,24%
4	Evaluasi Internal	25	11,80	11,98	11,99	0,19%
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,62	62,40	62,74	1,12%
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	

Pada tahun 2024 evaluasi SAKIP Pemerintah berpedoman pada peraturan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini menitikberatkan pada **“perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja”**. Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,74 dengan predikat “B”, yaitu implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3. 2 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Berau 20223-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan / Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,42	22,54	0,12%
2	Pengukuran Kinerja	30	17,94	18,02	0,08%
3	Pelaporan Kinerja	15	10,06	10,20	0,14%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	11,98	11,99	0,01%
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,40	62,74	0,34%
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	



Hasil evaluasi tahun 2024 **“jika dibandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 0,34 poin.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*) dan cukup. Contohnya pada indikator kinerja “(1) Persentase terlaksananya administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD serta administrasi keuangan PD; (2) Persentase terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan; (3) Persentase terlaksananya penyampaian laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas” untuk sasaran “Meningkatnya manajemen dan tata kelola pendidikan dasar, PAUD, dan kesetaraan” pada Perjanjian Kepala Dinas Pendidikan.
- 2) Belum memiliki pohon kinerja tingkat pemerintah daerah dan beberapa PD belum memiliki pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 diantaranya yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
- 3) Pohon kinerja yang telah disusun oleh beberapa PD belum teridentifikasi *Critical Succes Factor* (CSF) atau faktor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi. Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi yang ada saat ini dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja. Akibatnya, hubungan kinerja, strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum terbangun secara cukup contoh pada pohon kinerja Dinas Kesehatan.



- 4) Penetapan target pada PK tahun 2024 belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagaimana yang disampaikan dalam LKjIP tahun 2024. Contoh pada penetapan target PK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar” dengan indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik”.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Berau dan PD telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja. Hasil penilaian kinerja juga telah menjadi salah satu dasar dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut :

- 1) Telah memiliki aplikasi E-SAKIP yang digunakan untuk manajemen kinerja, khususnya untuk monitoring dan evaluasi kinerja, namun aplikasi tersebut belum termanfaatkan dengan baik yaitu pada menu realisasi kinerja yang merupakan fitur untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tidak berisi data.
- 2) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level PD belum dilengkapi definisi operasional dan formulasi pengukuran serta sumber data contoh pada IKU Dinas Pendidikan.

3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Berau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) maupun tingkat PD pada sebagian besar PD. Laporan tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang diperjanjikan serta dapat diakses oleh publik untuk laporan tingkat Pemda dan sebagian kecil PD melalui *website* PPID Kabupaten Berau. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat PD yang belum menyusun laporan kinerja Tahun 2024 yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.



- 2) Laporan kinerja pada tingkat PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hal tersebut terlihat pada laporan kinerja Badan Pendapat Daerah.
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contoh hal ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Inspektorat Daerah Kabupaten Berau telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi melalui Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut :
- 1) Ruang lingkup evaluasi internal yang dilakukan adalah evaluasi LKjIP bukan evaluasi atas implementasi SAKIP.
 - 2) Evaluasi internal belum dilakukan kepada seluruh PD. Hal ini dibuktikan dengan hanya sebagian PD yang memiliki Laporan Hasil Evaluasi Internal. Contoh Pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 3) Belum seluruh PD yang dievaluasi menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat, contohnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Perkebunan.
 - 4) Pemberian predikat internal belum mengikuti standar yang ada yaitu nilai diatas 70,01 masih mendapatkan predikat “B”. Contohnya pada Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan bada Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
5. Rekomendasi



Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan agar seluruh indikator kinerja tingkat PD memenuhi kriteria SAMRT dan cukup serta target kinerja yang ditetapkan lebih realistis.
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pohon kinerja pada tingkat Pemda dan seluruh PD mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja yang disusun diharapkan mampu menjabarkan kinerja utama ke dalam setiap tingkatan kinerja dengan baik, memenuhi unsur logis, dan mampu menyajikan alternatif kinerja yang efektif untuk mendorong tercapainya kinerja utama baik dilevel kabupaten maupun PD.
- 3) Memastikan aplikasi E-SAKIP dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan seluruh PD sebagai sarana untuk melakukan pemantauan capaian kinerja secara *realtime* yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 4) Memastikan seluruh dokumen IKU PD telah memuat definisi operasional dan formulasi pengukuran serta sumber data.
- 5) Memastikan seluruh PD menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran.
- 6) Memastikan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah dan seluruh PD dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam terkait efisiensi penggunaan sumber daya serta perbandingannya dengan capaian tingkat nasional/wilayah.
- 7) Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan target kinerja ke depan.
- 8) Melakukan evaluasi internal SAKIP terhadap seluruh PD bukan melakukan evaluasi LKj-IP. Evaluasi internal SAKIP berpedoman kepada Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2024.



- 9) Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti oleh seluruh PD yang dilengkapi dengan data dukung agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
- 10) Memastikan pelaksanaan evaluasi AKIP internal dilaksanakan secara berkualitas dengan melakukan reviu secara berjenjang sehingga tidak ditemukan lagi kesalahan di dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal.

3.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi pada hasil evaluasi AKIP Kabupaten Berau Tahun 2024, yaitu:

1. Melakukan reviu RENSTRA perangkat daerah, perjanjian kinerja (PK) dan Pohon Kinerja (POKIN) pada Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Menyusun dan menyempurnakan Pohon Kinerja (PKIN) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
3. Membuat surat edaran penginputan ESAKIP-Berau dan menjadwalkan kegiatan *desk* per triwulan.
4. Menyampaikan laporan evaluasi RKPD dan RPJMD.
5. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah.
6. Monitoring hasil tindak lanjut rekomendasi perangkat daerah oleh Tim APIP.
7. Menerbitkan instruksi Inspektur untuk melaksanakan evaluasi SAKIP sesuai Surat Keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun 2024.

3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai, keluaran (*output*) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun kategori dalam penilaian evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3 Kategori penilaian peringkat

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reformed</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Sub koordinator).
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.



6	C	30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : Kementerian PANRB

Secara umum Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14,47	13,37	92,39
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	9,98	9,57	95,89
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72,49	73,66	101,53
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	66,60	100	150,15
3	Menurunnya angka	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,62	5,15	88



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj-IP)
Tahun 2024

	pengangguran di Kab.Berau						
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4,95	5,08	97
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,00	3,50	175
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1,00	1,17	117
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9	Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	11,94	12,42	104
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	83	85,7	103,25
9	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	67,50	69,97	103,66
		12	Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	11,70	81,49	696,5
		13	Capaian akses air minum layak	Persentase	90	83.17	92,41
		14	Persenase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	23	32,97	143,54
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,74	99,60	99
		16	Rasio rumah layak huni	Persentase	0,198	0,207	105



10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	65	0,6	92
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,8	162
11	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59	59,96	100,65
		20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,27	91,61	106,18
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804	94,85	105,61
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/predikat	68 (B)	62,74	92
		24	Status kinerja penyelenggara pemerintah daerah Kab.Berau	Status	Tinggi (3,41)	3,1964*	93*
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/nilai	94,06 (A)	85	90

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Berau menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut:



Tabel 3.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% -100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang 55%	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran, dengan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi III terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran, dan 4 indikator kinerja.

Dari uraian diatas maka capaian sasaran dalam visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- ❖ Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 6 indikator kinerja.
- ❖ Misi III terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja.
- ❖ Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- ❖ 13 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Indikator Kinerja Utama
1	Misi 1	1	2	4	BS = 2, B = 2, C = - , K = -
2	Misi 2	2	6	6	BS = 4, B = 2, C = - , K = -



3	Misi 3	2	3	11	BS = 8, B = 3, C = - , K = -
4	Misi 4	1	2	4	BS = -, B = 4, C = - , K = -

Dari 13 (Tiga Belas) sasaran dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama, pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja
MISI I (4 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	2
2	Baik	2
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	4
MISI II (6 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	4
2	Baik	2
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	6
MISI III (11 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	8
2	Baik	3
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	11
MISI IV (4 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	-
2	Baik	4
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	4



3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Tujuan I Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya Saing

Tujuan Mewujudkan masyarakat Berau yang berdaya saing dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 4 (empat) indikator sasaran:

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
Mewujudkan masyarakat Berau yang berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah
		2. Rata-rata Lama Sekolah

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan”

Pendidikan merupakan yang terpenting yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitas dan layanan pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang mantap dan berkualitas.

Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Berau. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan 2 (dua) indikator kinerja rata-rata mencapai 93,50 dan termasuk predikat “**Baik**”.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,47	13,37	92,39
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,98	9,57	95,89



Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Harapan Lama Sekolah	%	13,35	13,36	13,37
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,54	9,56	9,57

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,83	13,37	90
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	10,26	9,57	93

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Harapan Lama Sekolah	%	13,37	13,21	-0,16
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,57	8,85	-0,72

1) Indikator harapan lama sekolah

Harapan lama sekolah merupakan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian harapan lama sekolah tahun 2024 adalah 13,37 tahun atau dengan persentase 90%. Capaian ini mendekati standar nasional 13,21 tahun.

2) Indikator Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat minimal



0 tahun dan maksimal 15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2024 adalah 9,57 tahun atau dengan persentase capaian 973% dari target 10,26. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Berau.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Peningkatan Akses Pendidikan.
2. Peningkatan Kualitas Guru.
3. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan di daerah Terpencil, Pedalaman dan Perkotaan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Kegagalan:

1. Angka Putus Sekolah yang Masih Tinggi.
2. Kurangnya Guru yang Bersertifikat Kompetensi.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Belum Merata.
4. Belum standar nya layanan pendidikan berbasis Penggunaan Teknologi Informasi.

Solusi:

1. Penyediaan Beasiswa kurang mampu.
2. Penyediaan Layanan Peningkatan Kompetensi Guru.
3. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana secara optimal, Peningkatan Anggaran Pendidikan.
4. Meningkatkan Standar Layanan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 3483 Orang Komposisi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Berau beserta Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari



PNS dan Non PNS dengan tingkat Kualifikasi Pendidikan rata-rata SMA dan S1/D4 (sudah termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah).

2. dalam pelaksanaan tugas didukung oleh anggaran sebesar Rp 804,200,535,722.00 dengan Realisasi Rp. 717.270.570.083.89 sebesar 89.35% dengan tingkat efisiensi berdasarkan hasil realisasi sebesar 10.65%.
3. Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah seluas 7.869 m2, serta Perangkat/Peralatan Pendukung Kerja dengan kondisi Baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

1. Meningkatnya Ketersediaan Dan perluasan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dasar , PAUD Dan Kesetaraan pada Program Pengelolaan Pendidikan di Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Pendidikan Kecakapan Hidup Dan Kearifan Lokal Pada Pendidikan Dasar , PAUD Dan Kesetaraan , Program Pengelolaan Pendidikan di Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah.
3. Meningkatnya Manajemen Dan Tata Kelola Pendidikan Dasar , PAUD Dan Kesetaraan Program Pengelolaan Pendidikan di Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Kesetaraan.

Kegagalan:

1. belum merata dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan terpenuhi.
2. kurang nya minat peserta didik untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup dan kearifan lokal.
3. masih rendahnya pengelola manajemen dan tata kelola pendidikan pada satuan pendidikan.



Solusi:

1. Memenuhi anggaran minimal 20% sesuai dengan amanat undang undang
2. Menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan Program/Kegiatan /anggaran Pendidikan pada Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di wilayah terpencil, pedalaman dan perkotaan.
3. menyusun kurikulum terkait pendidikan kecakapan hidup dan kearifan lokal agar lebih di pahami dan diminati peserta didik.
4. Memberikan layanan peningkatan kompetensi manajemen dan tata kelola pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Kesehatan”

Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2024 yaitu berjumlah 1.658.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan rata-rata capaian 125,84% dan termasuk predikat “**Baik Sekali**”.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Angka harapan hidup	%	72,49	73,66	101,53%
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	66,60	100	150,15%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
3	Angka harapan hidup	%	72,32	73,45	73,66



4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	82,81	100	100
---	--	---	-------	-----	-----

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
3	Angka harapan hidup	%	72,71	73,66	101,22%
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	100	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
3	Angka harapan hidup	%	73,66	74,15	-0,49
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	-	-

3) Indikator angka harapan hidup

Hasil pengukuran Indikator capaian dari target 72,49 terealisasi sebesar 101,53 persen, artinya setiap bayi lahir memiliki peluang hidup sampai dengan usia 72-73 tahun. Namun demikian, masih dibawah realisasi capaian nasional, yaitu 74,15. Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Angka harapan hidup (AHH) dihitung berdasarkan *data age specific deat rate* yang tersusun dalam sebuah tabel kematian. Angka harapan hidup adalah sarana evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.



Indikator angka harapan hidup (AHH) memperkirakan banyaknya tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk melihat *output* pembangunan kesehatan. Tingkat kesehatan yang lebih baik akan membawa peluang pada individu untuk bertahan hidup lebih lama. Hal ini tentunya harus didukung mudahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga seseorang yang sakit mudah untuk mendapatkan perawatan.

4) Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan

Hasil pengukuran Indikator capaian proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan target 66,60 dengan realisasi 100 dan capaian kinerja 150,15 persen.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 sistem jaminan sosial nasional bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan :

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Menurunnya persentase balita gizi buruk dari tahun sebelumnya.
3. Meningkatnya persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
4. Adanya program prioritas Bupati.
5. Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.



Kegagalan :

1. Masih tingginya rasio kematian ibu hamil dan kematian bayi

Solusi :

1. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil, bersalin, nifas, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita mengenai faktor-faktor risiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat.
2. Meningkatkan rujukan kegawat daruratan pada bayi baru lahir dapat langsung mengakses FKTRL sehingga komplikasi pada bayi dapat tertangani dengan baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Terealisasinya alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan melalui jaminan kesehatan.
2. Terpenuhinya pembiayaan penduduk miskin yang rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan :

1. Terlaksananya koordinasi antara dinas kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
2. Terlaksananya sosialisasi mengenai pendaftaran jaminan kesehatan kepada aparat kampung.
3. Terlaksananya program-program yang berkaitan dengan tercapainya angka harapan hidup seperti pemenuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan serta pemantauan kesehatan gizi, serta kesehatan lingkungan dan PHBS keluarga.
4. Terlaksananya program pelayanan kesehatan seperti adanya skrining kesehatan guna dapat membantu mendeteksi dini penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular.

Kegagalan : -

Solusi : -



B. Misi II : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Tujuan II Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing

Tujuan Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Berau dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 2 (dua) indikator sasaran:

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat yang Mantap dan Berdaya Saing	3. Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	5. Tingkat pengangguran terbuka
	4. Menurunnya angka kemiskinan	6. Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan

3. Sasaran “Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau”

Sasaran menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau masih menjadi perhatian khusus dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan penganggur pada suatu wilayah tidak hanya berdampak lemah Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau” mencapai 88 persen dan termasuk predikat “**Baik**”. perekonomian melainkan juga masalah sosial.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,62	5,15	88

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,02	4,95	5,15



Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,41	5,15	83

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,15	3,7	(+1,45)

5) Indikator tingkat pengangguran terbuka

Jumlah pengangguran bertambah 692 orang tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 6.16 persen tahun 2023 menjadi 4,95 persen pada 2024. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 129.561 orang, bertambah 21.398 orang dibandingkan kondisi pada tahun 2023. Keadaan tenaga kerja Kabupaten Berau tahun 2023 Penduduk usia kerja (PUK) 193.65 orang , angkatan kerja sebesar 129,56 orang, Pengangguran sebesar 6.407 orang dan Bukan angkatan kerja sebesar 74.333 orang.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

Program Pelatihan di bidang sangat menjanjikan untuk meningkatkan *skill* keterampilan seperti tata boga, digital *marketing* dan hidroponik yang sangat dibutuhkan, dan kami juga memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk siswa SMK

Kegagalan:

Penyebab kegagalan diantaranya adalah upah minimum, inflasi, investasi, tingginya jumlah pendatang, minimnya keterampilan angkatan kerja, serta kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan karena efisiensi atau proyek yang telah selesai.



Solusi:

Meningkatkan keterampilan dan *skill* serta selalu mencari informasi tentang lowongan kerja yang tersedia pada perusahaan tersebut dan selalu mengasah *skill*.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, karena melalui pengelolaan SDM yang baik kegiatan dapat dilaksanakan dan mencapai target yang sudah di tetapkan.
- 2) dengan ketersediaan anggaran maka kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengalami silpa anggaran.
- 3) Dengan adanya peralatan dan teknologi yang optimal sehingga target dapat tercapai dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan:

Serapan Anggaran di semua program dan sub kegiatan pada tahun 2024 sebesar 89,03%

Kegagalan : -

Solusi : -

4. Sasaran “Menurunnya angka kemiskinan”

Keberhasilan suatu pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu perekonomian bagi masyarakat dapat dilihat dari indikator kemiskinan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini indikator kemiskinan yang ada di Kabupaten Berau.

Indikator kemiskinan Kabupaten Berau 2020-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan	595.550	624.948	677,819	731,250
2	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa	13,62	13,31	13,26	12,35



3	Persentase Penduduk Miskin	5,88	5,65	5,54	5,08
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,95	0,98	0,16	0,41
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,20	0,22	0,01	0,07

Sumber: Dnas Sosial Desember 2024

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4,95	5,08	97%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5,65	5,54	5,08

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4,84	5,08	95%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5,08	9,03	-3,95



6) Indikator Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, dimana garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minuman non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Angka kemiskinan untuk tahun 2023 ada kenaikan sebesar 5,54 jika dibandingkan pada 2022 sebesar 5,65 persen. Sedangkan untuk tahun 2024 Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan dari target 4,95 terealisasi 5,08 dengan capaian 97%. Sedangkan untuk tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Berau sebesar Rp. 731,250,- per orang per bulan. Angka ini terus meningkat sejalan dengan harga barang dan jasa kebutuhan yang naik. Dengan garis kemiskinan tersebut, terdapat sebanyak 5,08 persen atau sekitar 12.350 jiwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

Program Pengolahan Data Fakir Miskin .Data menjadi landasan yang sangat penting untuk pelaksanaan program/kegiatan agar terlaksana secara lebih akurat. Dalam praktiknya terdapat tiga sumber data sasaran program kemiskinan yakni DTKS,P3KE dan Data Reksosek sehingga secara teknis cukup menyulitkan Namun untuk sasaran penerima program Dinas Sosial tetap menuju pada Data DTKS.

Kegagalan:

Belum tersinkronisasinya Data sasaran program yang bersumber dari Kemensos, Kemenko PMK dan BPS.

Solusi:

Perlu diupayakan untuk Rekonsiliasi Data sasaran program menjadi satu data tunggal.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Melakukan Pemadanan data secara berkala.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Keberhasilan:

Serapan Anggaran di Semua Program dan Sub. Kegiatan pada Tahun 2024 Sebesar 93.62%

Kegagalan:-

Solusi:-

Tujuan III Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Tujuan Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 4 (empat) indikator sasaran:

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	5. Meningkatnya Industri Kecil dan menengah (IKM)	7. Presentase Usaha mikro dan kecil
	6. Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
	7. Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	8. Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10. Score pola pangan harapan

5. Sasaran “Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)”

Jumlah UMKM di Kabupaten Berau Tahun 2024 Usaha Mikro sebesar 14.206, Usaha Kecil berjumlah 288 sedangkan Usaha Menengah 16 yang termasuk dalam 13 Kecamatan.



Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
7	Persentase Usaha mikro dan kecil	%	2,00%	3,50%	175%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	10,41	1,04	3,50

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	3	3,50	116

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	3,50	-	-

7) Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan satu miliar rupiah, tanpa termasuk tanah dan bangunan.



Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dan memiliki modal usaha lebih dari satu miliar sampai dengan lima miliar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha besar dan memiliki modal usaha lebih dari lima miliar sampai dengan 50 miliar.

Untuk mendukung UMKM di Kabupaten Berau Pemerintah melalui Dinas Koperindag telah melakukan berbagai program kegiatan yang terkait peningkatan sumber daya manusia di keterampilan para pelaku dan calon pelaku UMKM. Selain itu juga diadakan pelatihan-pelatihan guna peningkatan UMKM di Kabupaten Berau. Hal ini bisa dilihat bahwa UMKM setiap tahun mengalami kenaikan dimana target pada tahun 2024 sebesar 2 persen terealisasi sebesar 3,50 persen. Untuk daftar UMKM kami di setiap kecamatan dapat kami sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Daftar UMKM Kab.Berau Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah UMKM				
	2020	2021	2022	2023	2014
Tanjung Redeb	884	4592	5539	5547	5547
Sambaliung	602	2419	2645	2659	2659
Teluk Bayur	346	1321	1441	1449	1449
Gunung Tabur	104	988	1058	1061	1061
Segah	52	131	131	147	147
Tabalar	79	502	502	502	502
Biatan	32	51	51	51	51
Kelay	33	55	55	55	55
Talisayan	386	673	673	674	674
Batu Putih	300	351	351	351	351
Biduk-biduk	69	836	836	836	836



Maratua	200	340	340	340	340
Pulau Derawan	147	779	779	779	779
KTP Luar Berau	59	59	59	59	59
Total	3293	13097	14460	14510	14510

Sumber : Diskoperindag per Februari 2025

Tabel 3.9 Rekap Data Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 2024

Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah UMKM
Tanjung Redeb	5393	139	15	5547
Sambaliung	2604	55	0	2659
Teluk Bayur	1447	2	0	1449
Gunung Tabur	1042	19	0	1061
Segah	140	7	0	147
Tabalar	490	12	0	502
Biatan	46	4	1	51
Kelay	52	3	0	55
Talisayan	650	24	0	674
Batu Putih	341	10	0	351
Biduk-biduk	825	11	0	836
Maratua	338	2	0	340
Pulau Derawan	779	0	0	779
KTP Luar Berau	59	0	0	59
Total	14206	288	16	14510

Sumber : Diskoperindag per Februari 2025

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

Jumlah pertumbuhan UMKM baru selama periode yang di laporkan berhasil melampaui target pada RPJMD, sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha



Kegagalan:-

Solusi:-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah sumber daya yang ada tidak sebanding dengan banyaknya, dan laju pertumbuhan UMKM di kabupaten berau, sehingga kesulitan dalam *update* data, sehingga perlu pengusulan penambahan personil olah data UMKM.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

Program yang ada sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan UMKM dan wirausaha baru.

Kegagalan:-

Solusi:-

6. Sasaran “Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism*”

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,00	1,17	117

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,38	1,38	1,17



Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,03	1,17	114

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,17	-	-

8) Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan salah satu indikator kinerja daerah Kabupaten Berau, dengan sasaran strategis: Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism*. Target Kinerja Daerah untuk PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2024 adalah 1,00%, sedangkan untuk data realisasi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2024 berdasarkan informasi yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Berau masih dalam proses perhitungan sehingga belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi PDRB pada Tahun 2023.

Adapun realisasi kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2023 dengan target 0,99 terealisasi sebesar 1,75%. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sejumlah 422.592 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 420.926 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.666 orang. Hasil Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau pada tahun 2024 mengalami kenaikan, yaitu sejumlah 557.214 orang yang terdiri dari



wisatawan nusantara sebanyak 552.920 dan wisatawan mancanegara sebanyak 4.294 orang.

PDRB sektor pariwisata merupakan bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, dimana dikenal sebagai daerah wisata alam bawah laut baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tempat wisata yang menarik yaitu Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki dan Pulau Kakaban serta adanya Labuan Cermin di Biduk-biduk. Sehingga hal inilah yang menarik para pengunjung untuk datang ke Kabupaten Berau. Untuk rekapitan kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau sebagai berikut:

**Rekapitulasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau
Tahun 2019-2024**

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN		JUMLAH
		WISMAN	WISNUS	
1	2019	8.323	292.692	301.015
2	2020	220	127.176	127.396
3	2021	85	141.398	141.483
4	2022	283	397.054	397.337
5	2023	1.666	420.926	422.592
6	2024	4.294	552.920	557.214
TOTAL		14.871	1.932.166	1.947.037

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau

Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024

No	Bulan	Wisatawan Mancanegara			Wisatawan Domestik		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Januari	-	78	126	23.642	37.640	31.720
2	Februari	-	54	233	14.926	19.505	29.681
3	Maret	4	54	312	14.474	17.853	21.079
4	April	5	235	517	9.476	32.247	75.593
5	Mei	7	97	370	51.837	18.967	32.900



6	Juni	10	114	346	24.818	30.881	46.932
7	Juli	61	165	441	38.408	22.937	47.645
8	Agustus	50	221	724	24,799	31.111	32.191
9	September	60	338	523	9.874	55.121	107.231
10	Oktober	28	175	441	29.986	31.709	31.482
11	November	10	85	193	87.753	80.020	38.999
12	Desember	48	50	68	87.753	42.935	57.467
	Jumlah	283	1.666	4.294	397.054	420.926	552.920

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Terlaksananya pembangunan sejumlah amenitas pariwisata di beberapa Lokasi destinasi pariwisata sesuai target
2. Terlaksananya peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan melalui sejumlah pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2024
3. Terlaksananya sejumlah Event yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
4. Terlaksananya promosi pariwisata melalui media cetak maupun media online
5. Pada Anugerah Desa Wisata Tahun 2024, terdapat 8 desa wisata masuk dalam 500 besar, 7 desa wisata masuk dalam 300 besar dan 3 desa wisata masuk dalam 100 besar serta 1 desa wisata masuk dalam 50 besar ADWI 2024 dan desa wisata Kepulauan Derawan meraih juara III untuk kategori digital.

Kegagalan:

1. Kegiatan yang bersumber dari DAK non fisik tidak dapat terlaksana karena adanya edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Pemetaan Sub Kegiatan DAK non fisik, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah pergeseran sub kegiatan yaitu di anggaran



perubahan, sedangkan berdasarkan juknis DAK non fisik tidak memenuhi syarat waktu pelaksanaan kegiatan

2. Masih rendahnya pemahaman Masyarakat atau Lembaga budaya dalam syarat dan ketentuan penerima hibah, sehingga tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hibah.

Solusi:

1. Memedomani juknis DAK non fisik
2. Memberikan pemahaman terkait syarat dan mekanisme hibah kepada Masyarakat.

Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya:

1. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Melalui pengelolaan SDM dan kinerja yang baik dari setiap individu, dengan jumlah SDM yang terbatas pada setiap bidang, secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Anggaran yang tersedia secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat pula realisasi kinerja sesuai target dengan serapan anggaran yang lebih sedikit dari target anggaran yang telah ditetapkan.
3. Melalui peralatan dan teknologi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kegiatan, terutama dalam rangka digitalisasi promosi pariwisata melalui media elektronik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan:

1. Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata melalui kegiatan pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota, pada program ini menunjang pencapaian kinerja OPD, karena telah dilaksanakan sesuai target dan diperoleh sejumlah keberhasilan dalam pelaksanaannya, yaitu masuknya sejumlah desa wisata dalam DWO 2024 dan Desa Wisata



Kepulauan Derawan meraih juara III untuk kategori digital, juara III lomba Pokdarwis se-Kalimantan Timur, serta jmlah kunjungan wisatawan yang jauh melampaui target kunjungan yang telah ditetapkan.

2. Program pemasaran pariwisata, melalui kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Terik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota telah dilaksanakan *event* dan pameran pariwisata serta promosi pariwisata ke beberapa kota di luar maupun dalam Provinsi Kalimantan Timur, sehingga diharapkan dapat mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Berau.
3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat dasar dan kegiatan ekonomi kreatif tingkat dasar dan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang dapat berkunjung.
4. Program pengembangan kebudayaan, pada program ini terlaksana 3 *event* daerah, 2 ajang pemilihan duta budaya dan duta pariwisata, serta 13 tradisi budaya masyarakat pesta adat, pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah dan tradisi budaya yang ada di Masyarakat.
5. Program pengelolaan permuseuman melalui kegiatan pengelolaan museum kabupaten/kota telah dilakukan pengelolaan terhadap 2 museum dan 1 keraton yang ada di Kabupaten Berau, yaitu museum Batiwakkal Gunung Tabur, Keraton Sambaliung dan Museum Siraja Teluk Bayur.

Kegagalan:

1. Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan Lembaga adat, pada sub kegiatan ini capaian kinerja masih rendah disebabkan terdapat kelompok atau Lembaga adat sebagai penerima hibah alat kesenian yang belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga belanja hibah alat kesenian tidak dapat direalisasikan.



2. Tidak merealisasikan belanja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku memberikan pemahaman terkait persyaratan penerima hibah kepada Masyarakat.

7. Sasaran “Meningkatnya produksi sektor primer”

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan target 11,86 dapat terealisasi sebesar 11,26 % dengan tingkat capaian adalah 94,94%. Produksi Pertanian meliputi padi (padi sawah dan ladang) , produktivitas jagung dan produktivitas cabai (besar, keriting dan rawit).

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11,94	12,42	104

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9,33	11,26	12,42

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	12,09	12,42	103



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	12,42	-	-

9) Indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Dari target padi 3,37 ton/ha terealisasi 3,40 ton/ha dengan tingkat capaian 100%, untuk jagung dari target 5,85 ton/ha terealisasi 5,55 ton/ha dengan tingkat capaian 94% sedangkan produktivitas cabai target 4,02 ton/ha realisasi sebesar 3,67 ton/ha capaian 91%.

Pencapaian yang mendukung produktivitas pertanian padi, jagung dan cabai adalah kondisi alam, tersedianya sarana pertanian (bantuan alat mesin pertanian, bantuan benih, pupuk dan pestisida), tersedianya prasarana pertanian (jaringan irigasi, pintu air DAM parit, jalan usaha tani, lantai jemur dan embung) serta pelatihan penyuluh, pembinaan kelembagaan kelompok tani serta adanya pendampingan PPL. Sedangkan untuk sektor perikanan target produksi perikanan tangkap tahun 2024 yaitu 25.569,53 ton dengan realisasi 26.323,93 ton.

Produksi perikanan secara umum meningkat, ini terlihat dari jumlah produksi Tahun 2024 dan harga jual per komoditi. Hal ini berdampak pada kontribusi sektor perikanan dalam memberikan sumbangsih bagi PDRB Kabupaten di sektor pertanian dalam arti luas. Daya beli masyarakat Berau secara umum meningkat, hal ini terlihat dari kenaikan daya beli dan produksi sektor perikanan karena terdampak dari sektor tambang/ sawit yang kembali bergairah, dimana banyak ijin lokasi dan operasional yang diajukan oleh sektor tersebut.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan:



a. Sektor Perikanan

1. Jumlah target produksi perikanan tangkap tahun 2024 adalah 25.569,53 ton sedangkan realisasinya mencapai 26.323,93 ton, hal ini disebabkan :
 - Stimulan bantuan dari Pemda dan pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Adanya Zonasi pemanfaatan perairan yang mengatur jalur tangkap
 - Bimbingan teknis nelayan
 - Pemberian BPJS ke nelayan
2. Jumlah target produksi perikanan budidaya tahun 2024 adalah 2.452,01 ton sedangkan realisasinya mencapai 3.493,78 ton, hal ini disebabkan :
 - Dukungan para pihak terkait pengembangan kawasan perikanan budidaya
 - Stimulan paket bantuan budidaya
 - Bimbingan Teknis pembudidaya
 - Kontribusi produksi BBI dalam mendukung kegiatan budidaya
 - Dukungan pemerintah Provinsi Kaltim terkait stimulan bantuan yang bukan kewenangan Kabupaten Adanya rekomendasi BBM
3. Jumlah target produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun 2024 adalah 4.759,53 ton sedangkan realisasinya mencapai 4.777,78 ton. Hal ini disebabkan :
 - Meningkatnya kemampuan pelaku usaha perikanan terkait diversifikasi usaha olahan
 - Meningkatnya hasil sampingan produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - Tumbuhnya sentra-sentra kawasan olahan perikanan
4. Pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya di perairan umum berhasil karena :
 - Tingginya intensitas pengawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di perairan umum
 - Tingginya intensitas pembinaan dan sosialisasi kepada pembudidaya dan nelayan



b. Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Faktor cuaca yang baik, sehingga hasil panen relatif baik
2. Adanya bantuan bibit bermutu dalam jumlah cukup
3. Gerakan pengendalian (GERDAL) Organisme Pengganggu Tanaman yang dilakukan secara intensif dan masif.
4. Dukungan balai proteksi Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian hama dan penyakit
5. Penyediaan alat mesin pertanian
6. Kegiatan rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier
7. Harga cabai di pasaran cukup baik, sehingga memacu semangat petani dalam berbudidaya cabai
8. Adanya peningkatan kualitas SDM petani cabai

c. Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Dilaksanakannya Penguatan Kelembagaan dengan cara Sosialisasi dan Pelatihan Teknik Budidaya maupun penanganan pasca panen untuk petani pekebun.
2. Pemberian bantuan stimulan berupa bantuan bibit komoditi perkebunan, pupuk maupun obat-obatan untuk pengendalian hama/penyakit tanaman.
3. Pemberian bantuan pelatihan pengolahan pasca panen maupun pemberian bantuan alat pengolahan pasca panen kakao berupa bak fermentasi untuk petani di sentra pengembangan kakao
4. Pendampingan perijinan dan Penilaian Usaha Perkebunan bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Kebun Kemitraan.
5. Pemantauan dan Pembinaan pengelolaan lahan dengan Nilai Konservasi Tinggi di wilayah Kawasan Perkebunan baik PBS maupun Masyarakat Kampung.

Kegagalan:

a) Sektor Perikanan

1. Konflik alat tangkap
2. Alat tangkap tidak ramah lingkungan
3. Masih rendahnya penguasaan teknologi alat tangkap ramah lingkungan



4. Masih belum meratanya tingkat SDM pembudidaya
5. Sifat karakter lahan tambak yang bersifat sulfat masam
6. Kurangnya sarana pendukung di kawasan budidaya tambak seperti listrik, air bersih karena terbatas akses
7. Tingkat adaptasi teknologi yang terbatas
8. Terbatasnya sarana pendukung olahan hasil perikanan
9. Terbatasnya perijinan terkait olahan perikanan yang sudah terbit (BP POM, PIRT, Halal)
10. Terbatasnya *outlet*/ rumah produksi di sentra kawasan olahan perikanan
11. Jauhnya jangkauan pengawasan
12. Kurangnya tingkat kesadaran terkait penggunaan bahan ramah lingkungan dan alat tangkap ramah lingkungan oleh pembudidaya dan nelayan.

b) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Petani banyak yang tidak menanam jagung.
2. Petani banyak menggunakan bibit komposit dan sumber bibit lainnya

c) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

Ada dana DBH Sawit yang tidak dapat digunakan karena:

1. Kode Rekening Kegiatan tidak sesuai dengan kodifikasi hasil pembahasan RKP DBH Sawit TA. 2024 Tanggal 21 Maret 2024
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 /PMK/07/2023 tentang DBH Sawit baru diketahui setelah penyusunan RKP dan SIPD sehingga beberapa rincian kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut
3. Kegiatan yang disusun sebagian besar berupa pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas masih sangat memerlukan dukungan perangkat dimaksud.



Solusi:

a) Sektor Perikanan

1. Kesepakatan penggunaan alat tangkap antar kelompok nelayan
2. Perlu adanya stimulan alat tangkap ramah lingkungan
3. Bimbingan Teknis alat tangkap mesin dan jejaring pasar bisnis hasil perikanan
4. Bimbingan Teknis berdasarkan skala prioritas sentra kawasan bagi pelaku usaha perikanan budidaya
5. Perlu adanya perlakuan tambahan untuk meningkatkan produktivitas lahan tanah sulfat masam dalam bentuk remediasi tanah sulfat masam dan pengapuran
6. Perlu adanya teknologi terbarukan yang bersumber dari energi terbarukan hemat lingkungan seperti PLTS dan PLTA
7. Perlu adanya dempond perikanan budidaya sebagai pusat pendidikan dan pelatihan teknologi sebelum diaplikasikan ditingkat lapang.
8. Stimulan bantuan pengolahan ikan skala rumah tangga yang higienis dan ramah lingkungan
9. Membantu kepengurusan perijinan terkait olahan perikanan (PIRT, BP POM Halal)
10. Stimulan pembangunan rumah produksi atau kemitraan dengan mitra pembangunan
11. Pembinaan dan sosialisasi berupa FGD, seminar, sekolah lapang
12. Kemitraan dengan mitra pembangunan dan kampung

b) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Pengadaan benih jagung, padi, cabai dan bawang merah.
2. Pengadaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman.
3. Gerakan pengendalian (GERDAL) organisme pengganggu tanaman.
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis budidaya dan pasca panen bagi petani.
5. Peningkatan kualitas SDM bagi petani dan petugas melalui kegiatan pembelajaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:



a) Sektor Perikanan

1. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dalam kinerja adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data SDM untuk melihat seberapa efisien SDM digunakan dalam bekerja. Analisis ini dapat membantu organisasi (OPD) meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai. Dengan jumlah SDM yang terbatas di Dinas Perikanan yang ada di sekretariat dan bidang-bidang secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kompilasi dari rencana kegiatan anggaran dari masing-masing OPD. Artinya OPD memiliki peran yang penting dalam perencanaan serta realisasi dari anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian hal yang harus diutamakan adalah bagaimana perencanaan dan realisasi anggaran pada setiap OPD. Namun mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran pada level OPD masih sangat terbatas. Dengan anggaran yang tersedia di Dinas Perikanan yang ada di sekretariat dan bidang-bidang secara umum program dan kegiatan dinas dapat dilaksanakan dan mencapai target realisasi keuangan yang telah ditetapkan.
3. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah mempercepat akses terhadap proses kegiatan organisasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Melalui peralatan dan teknologi yang ada di Dinas Perikanan dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target program dan kegiatan yang ada di dinas.

b) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Peralatan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan pemanfaatan SGD hewan/tanaman telah tercukupi sesuai dengan kebutuhan yaitu GPS 1 unit dan Pompa Air 43 unit. GPS dan pompa air memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman. Penggunaan yang optimal dan distribusi tepat sasaran akan berdampak pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, bahan bakar atau Listrik



2. Tenaga teknis perbengkelan alat mesin pertanian belum tersedia, hal ini sangat diperlukan untuk menganalisis secara teknis alat mesin pertanian yang ada, mulai dari Analisa kerusakan hingga rekomendasi yang bisa diberikan kepada para pemegang alsintan ditingkat petani.
3. Fasilitasi kendaraan bermotor untuk petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) kecamatan sebanyak 5 orang baru tersedia 3 unit dengan kondisi 1 unit rusak.
4. Jumlah penyuluh saat ini sebanyak 45 orang dengan jumlah kelompok tani sebanyak 847 kelompok. Sedangkan pedoman dari Kementerian Pertanian RI, rasio ideal adalah 1 penyuluh untuk 3-5 kelompok tani.
5. Kelembagaan petani pada umumnya berusia lanjut, yang berpengalaman dan sebagai penguat kelembagaan.

c) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Kode Rekening Kegiatan tidak sesuai dengan kodifikasi hasil pembahasan RKP DBH Sawit TA. 2024 Tanggal 21 Maret 2024
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 /PMK/07/2023 tentang DBH Sawit baru diketahui setelah penyusunan RKP dan SIPD sehingga beberapa rincian kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut
3. Kegiatan yang disusun sebagian besar berupa pengadaan barang dan jasa dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas masih sangat memerlukan dukungan perangkat dimaksud.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan:

a) Sektor Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap :
 - Adanya penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan 0-30 GT dari Dinas Perikanan melalui Bidang penangkapan dan pelayanan usaha yang bisa membantu nelayan mendapatkan BBM dengan harga yang lebih murah serta kuota yang lebih banyak dengan syarat dan ketentuan



yang telah ditetapkan sehingga nelayan bisa melaksanakan aktivitas melaut dengan lebih produktif untuk meningkatkan hasil tangkapan.

- Adanya program bantuan stimulan berupa sarana dan prasarana perikanan seperti alat tangkap ramah lingkungan, *fish finder*, perahu, mesin ketinting dan mesin diesel yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas nelayan yang pada akhirnya bisa meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatannya.
- Pengambilan data sampling untuk data statistik perikanan ke beberapa kampung yang rutin dilakukan setiap bulan, beberapa desa sampling langsung didatangi dan lainnya melalui telepon

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya :

- Adanya penambahan sentra kawasan perikanan budidaya baik utara, tengah dan selatan
- Kontribusi pihak ketiga terkait pengembangan komoditi air tawar seperti PT. Berau Coal terkait mina padi dan pembesaran
- Peningkatan produksi budidaya tambak mendapat dukungan dari YKAN dan mitra pembangunan lainnya
- Adanya komoditi tambahan budidaya rumput laut di sentra kawasan bagian Selatan
- Adanya peningkatan wawasan pembudidaya yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan informasi media sosial
- Adanya korelasi peningkatan permintaan benih BBI dan UPR dengan produksi perikanan budidaya
- Adanya inisiasi kampung terkait pengembangan budidaya air tawar, terkait kolam terpal dan pembenihan
- Adanya stimulan bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan DKP Provinsi
- Adanya monitoring hama dan penyakit ikan terkait keluhan dan informasi layanan pemeriksaan kualitas air dan penyakit serta penanganannya

3. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

- Adanya dukungan personil dari bidang penangkapan, budidaya dan sekretariat untuk melaksanakan kegiatan pengawasan



- Adanya sarana pengawasan (*speedboat* mesin 80 PK 2 unit)
 - Adanya dukungan pokmaswas yang sering memberikan informasi pelaku kegiatan *illegal fishing*
 - Adanya dukungan nelayan kampung yang ramah lingkungan diantaranya (Kampung Sukan Tengah, Batu-Batu dan Pulau Besing)
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
- Adanya dukungan data dan informasi perikanan yang benar dan valid dari pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendukung pengambilan Keputusan
 - Potensi hasil perikanan cukup besar sehingga memudahkan ketersediaan bahan baku dalam kegiatan pengolahan hasil perikanan
 - Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta, BUMN/ BUMD, LSM dan pelaku usaha dalam pengembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan

b) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditunjang dengan anggaran yang memadai untuk penyediaan benih padi, jagung hibrida, bawang merah, cabai besar, dan cabai keriting serta penyediaan alat mesin pertanian terdiri dari traktor roda dua, traktor roda empat, traktor roda dua rotary, alat perontok serba guna, mesin rumput, *hand sprayer* manual, vertikal *dryer* padi, bangunan rumah *dryer*, *cultivator*.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian ditunjang dengan anggaran untuk Pembangunan DAM Parit, pintu air, lantai jemur dan RJIT.
3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditunjang dengan anggaran untuk penyediaan stok pestisida dalam pengendalian OPT ke Kelompok Tani.
4. Program perizinan usaha pertanian ditunjang anggaran untuk melaksanakan verifikasi BBM pertanian atas usul penerbitan rekomendasi bagi petani sebagai penunjang kegiatan usaha.
5. Program penyuluhan pertanian ditunjang dengan anggaran untuk peningkatan kapasitas penyuluh, penyediaan fasilitas dan transportasi, pembinaan kelembagaan petani dan penyediaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan penyuluhan pertanian termasuk fasilitas kantor BPP.



c) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan memberikan bantuan berupa Bibit, Pupuk dan Obat-obatan penunjang sarana pertanian/perkebunan melalui penguatan usaha intensifikasi dan Rehabilitasi/ Peremajaan tanaman perkebunan sebagai stimulus bagi petani/pekebun dalam usaha budidaya komoditi tanaman Perkebunan.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian, dengan memberikan bantuan berupa Bibit, Pupuk dan Obat-obatan penunjang prasarana pertanian/perkebunan melalui usaha ekstensifikasi/perluasan lahan tanaman komoditi perkebunan sebagai stimulus bagi petani/pekebun dalam usaha budidaya komoditi tanaman Perkebunan.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, memberikan pendampingan bagi petani/pekebun swadaya maupun pengusaha perkebunan / PBS dalam pengolahan usaha budidaya perkebunannya dengan tetap memperhatikan kestabilan lingkungan dengan menekankan pembukaan lahan untuk budidaya komoditi perkebunan **tanpa** melalui usaha pembakaran lahan / hutan dan juga lebih menekankan pemanfaatan penggunaan pupuk maupun obat-obatan dari bahan nabati yang tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
4. Program Perijinan Usaha Pertanian, Dengan tujuan tertibnya pelaksanaan perijinan Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Berau dengan Indikator kinerja Terkendalinya Perijinan Usaha Perkebunan Besar terlaksana melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar dan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat.
5. Program Penyuluhan Pertanian, dengan memberikan pelatihan pendampingan petani/pekebun untuk menambah wawasan dan inovasi baru dalam hal usaha pengembangan budidaya komoditi perkebunan yang dilakukannya.



Kegagalan:

a) Sektor Perikanan

1. Ketersediaan kuota BBM nelayan masih belum sesuai dengan kebutuhan BBM untuk operasional kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat atau pelaku usaha perikanan dalam syarat dan ketentuan penerima hibah, sehingga tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hibah
3. Penganggaran untuk kegiatan pengambilan sampling ke lapangan masih terbatas sehingga tidak semua desa sampling didatangi langsung tapi beberapa hanya melalui via telepon, dengan kondisi jaringan yang tidak stabil mengakibatkan data yang kita perolehan untuk diolah
4. Rendahnya produktivitas lahan tambak karena faktor karakter tanah yang bersifat sulfat masam
5. Fluktuasi harga pasar komoditi perikanan khususnya ketika terjadi over produksi
6. Tidak stabilnya harga komoditi udang di pasar dunia
7. Masih ada persepsi dari pelaku usaha budidaya terkait kepengurusan NIB sebagai salah satu syarat legalitas usaha
8. Pendataan data produksi di tingkat lapangan yang tidak optimal
9. Belum adanya penetapan kawasan perikanan budidaya usaha
10. Tingginya biaya operasional pakan
11. Belum adanya dempond perikanan budidaya sebagai salah satu diseminasi kaji terap teknologi tepat guna
12. Banyaknya ikan konsumsi dan benih yang didatangkan dari luar daerah tanpa dokumen yang dianjurkan
13. Kurangnya jumlah pengawas perikanan
14. Belum tersedianya peralatan komunikasi dalam kegiatan pengawasan
15. Masih rendahnya kesadaran nelayan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
16. Masih rendahnya kesadaran pembudidaya ikan untuk menggunakan bahan ramah lingkungan, obat yang direkomendasikan , pakan yang baik
17. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran dalam memberikan informasi yang akurat



18. Rendahnya motivasi kewirausahaan wanita nelayan
19. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan
20. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
21. Terbatasnya tenaga teknis dan penyuluh perikanan
22. Terbatasnya akses pasar produksi hasil perikanan

b) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Penyediaan benih cabai rawit seluas 7 Ha tidak dapat terealisasi karena spesifikasi dan *merk* dagang yang tercantum di SSH tidak produksi lagi
2. Pembangunan prasaran lainnya yaitu Jalan Usaha Tani hanya terserap sekitar 71% dikarenakan teknis di lapangan.
3. Pelaksanaan temu usaha pertanian tidak dapat terealisasi maksimal dikarenakan penjadwalan narasumber tertunda
4. Belanja pupuk NPK untuk bahan Demplot penyuluh swadaya dikarenakan teknis penerima pupuk tidak boleh personal/perorangan.

Solusi:

a) Sektor Perikanan

1. Perijinan kapal nelayan dijadikan dasar untuk memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dengan menerbitkan rekomendasi BBM nelayan, sehingga nelayan dapat membeli BBM dengan harga subsidi di SPBU, SPBN dan SPBUN yang terdekat dari kampung mereka
2. Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman terkait syarat dan ketentuan hibah
3. Berkoordinasi dengan tim anggaran agar saat asistensi bisa ditambahkan anggaran untuk kegiatan pengambilan data di lapangan
4. Sosialisasi penggunaan pro biotik dan kapur dalam peningkatan produktivitas lahan
5. Perlu adanya jejaring pasar dan informasi terkait ketersediaan dan kebutuhan pasar oleh para pihak/ asosiasi, pemda dan mitra pembangunan
6. Perlu adanya sertifikasi pasar udang organik dan ramah lingkungan sehingga memiliki pasar tersendiri dengan harga yang baik



7. Sosialisasi perijinan budidaya dan NIB di sentra kawasan oleh Dinas Perikanan dan DPMPTSP
8. Optimalisasi pendataan produksi dengan melibatkan penampung, ketua kelompok, PPL dan TPI
9. Perlu adanya penetapan kawasan perikanan budidaya yang mengakomodir pembangunan perikanan terintegrasi
10. Peningkatan manajemen kelompok dalam sisi pemasaran hasil perikanan terkait dengan diversifikasi usaha produk perikanan
11. Perlu adanya stimulan pakan mandiri dan analisa ekonomi terkait kebutuhan pakan dan biaya *output* dalam pembuatan pakan
12. Perlu adanya dempond perikanan budidaya sebagai salah satu diseminasi kaji terap teknologi tepat guna disentra kawasan untuk memudahkan kaji terap teknologi ditingkat lapangan
13. Perlu adanya koordinasi yang baik dengan kegiatan pengawasan terkait pendataan aktivitas ikan yang didatangkan dari luar baik benih maupun ikan konsumsi secara rutin di sentra kawasan budidaya dan pasar tradisional
14. Penambahan jumlah pengawas perikanan
15. Melengkapi sarana peralatan komunikasi yang memadai
16. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, teguran dan peringatan tertulis pada pelaku kegiatan *illegal fishing*
17. Sosialisasi dan pembinaan pembudidaya ditingkat lapang dengan materi cara penggunaan bahan ramah lingkungan pengelolaan limbah budidaya yang baik, dan penerapan CBIB
18. Meningkatkan kualitas data produksi pengolahan, jumlah dan harga pemasaran, konsumsi ikan dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
19. Melakukan kegiatan pelatihan, bimbingan dan pendampingan bagi pengolah dan pemasar untuk pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
20. Menginventarisasi harga ikan pada tingkat penampung dan pedagang langsung sampai ke tingkat pengolah
21. Melakukan pendampingan legalitas/ ijin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
22. Meningkatkan kegiatan promosi produk olahan perikanan



b) Sektor tanaman pangan dan hortikultura

1. Pengusulan standar harga baru yang disesuaikan dengan survei harga pasar secara berkala, penyusunan harga standar berbasis data aktual, pemanfaatan sistem *e-catalogue*, dan penetapan harga standar yang fleksibel.
2. Evaluasi dan koordinasi untuk perencanaan berikutnya.
3. Meningkatkan koordinasi terkait kegiatan temu usaha dan Menyusun jadwal kesepakatan bersama.
4. Konsultasi dan koordinasi untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya karena demplot berperan sebagai sarana edukasi, pengenalan teknologi, dan motivasi bagi petani.

8. Sasaran “Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan”

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
10	Score pola pangan harapan	score	83	85,7	103,25%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
10	Score pola pangan harapan	score	89,5	86,9	85,7

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
10	Score pola pangan harapan	score	85,1	85,7	100,7



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
10	Score pola pangan harapan	score	85,7	85,7	-

10) Indikator Score pola pangan harapan

Capaian realisasi Skor Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 adalah sebesar 85,7 poin dengan target sebesar 83 poin dengan capaian kinerja sebesar 103,25 persen, capaian ini melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Hal ini disebabkan karena semakin beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Berau, walaupun masih belum memenuhi kaidah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. PPH merupakan indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, jika score PPH semakin mendekati 100, maka konsumsi pangan masyarakat beragam dan bergizi seimbang.

Dari hasil capaian PPH konsumsi Kabupaten Berau Tahun 2024, yaitu sebesar 85,7 yang melampaui target kinerja PPH tahun 2024 yang telah ditetapkan di RPJMD, dengan komposisi over konsumsi pada padi-padian (terutama konsumsi beras dan tepung) yaitu sebesar 51,5% dari nilai ideal sebesar 50%, pangan hewani sebesar 15,9% dari nilai ideal 12%, serta minyak dan lemak sebesar 11,9% dari nilai ideal 10%. Sedangkan untuk kelompok pangan yang juga harus mendapat perhatian karena nilai konsumsinya yang masih rendah dibandingkan nilai ideal adalah konsumsi sayur dan buah, kacang-kacangan serta konsumsi umbi-umbian. Angka inilah yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Berau belum beragam dan bergizi seimbang.

Jika dibandingkan dengan nilai PPH Indonesia tahun 2024 yaitu sebesar 95,06 point, berdasarkan AKE (angka kecukupan energi) 2.100 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) 57 gr/kapita/hari maka skor PPH Kabupaten Berau masih di bawah PPH Nasional, sehingga masih



perlu upaya peningkatan nilai PPH, dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah, kacang-kacangan serta umbi-umbian dan mengurangi konsumsi beras dan tepung. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau adalah dengan percepatan penganeekaragaman pangan ke arah konsumsi pangan lokal non beras terigu serta meningkatkan konsumsi sayur-sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan (P2L). Dengan kegiatan ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan masyarakat akan konsumsi beras dan terigu serta meningkatkan konsumsi sayur-sayuran dan umbi-umbian.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan analisa kami program dan kegiatan yang bisa menunjang keberhasilan capaian kinerja skor konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) pada dokumen RPJMD adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat.
Pagu Anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.419.311.000,- dengan capaian realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.728.918.984,- atau persentase capaian sebesar 79.80 %
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
 - b) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota



C. Misi III : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan IV Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Tujuan Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 8 (delapan) indikator sasaran:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	9. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
		12) Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan
		13) Capaian Akses Air Minum Layak
		14) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		15) Persentase rumah tangga pengguna listrik
		16) Rasio rumah layak huni
	10. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17) Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten
		18) Indeks SPBE

11. Sasaran “Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan 6 (enam) indikator.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67,50	69,97	103,66%
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,70	81,49	696,5%
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	90.00	83.17	92,41%



14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	23	32,97	143,54%
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,74	99,60	99
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,198	0,207	105%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	66,93	67,05	69,97
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	79,65	79,84	81,49
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	81,51	81,70	83.17
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	22,53	73,61	32,97
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	93,50	99,99	99,60
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,197	0,2	0,207

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	68,50	69,97	102
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	13,70	81,49	594
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	97	83.17	85
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	33	32,97	99
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,94	99,60	100
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,2	0,207	104



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
11	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	69,97	-	-
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	81,49	-	-
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	83,17	-	
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	32,97	-	
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,60	-	
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,207	-	

11) Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Presentasi panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Berau data tahun 2022 untuk kewenangan negara 12 persen, provinsi 11 persen dan kabupaten 77 persen. Pada tahun 2024 ini Realisasi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap target 68,50 terealisasi 69,97 dengan capaian 102% Adapun data panjang jalan menurut permukaan jalan di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

No.	Jenis permukaan jalan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Beton	95,99	113,03	140,47	140,47
2	Aspal	452,62	480,83	515,53	515,53
3	Telford/Kerikil	201,89	256,77	323,42	323,42
4	Tanah belum tembus	927,82	827,69	698,89	698,89
	Jumlah	1.678,32	1.678,32	1.678,32	1.678,32



Untuk panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Berau bisa tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Kondisi Jalan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Baik	496,13	501,63	542,42	542,42
2	Sedang	615,11	621,61	631,82	631,82
3	Rusak	484,90	378,11	344,57	344,57
4	Rusak Berat	82,19	176,97	159,51	159,51
	Jumlah	1.686,08	1.678,32	1.678,32	1.678,32

Kondisi jalan per Kecamatan di Kabupaten Berau Tahun 2024
tergambar pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Total Panjang Jalan (Km)	Presentase jalan kondisi mantap
		Baik	Sedang	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat		
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)		
1	Tanjung Redeb	72,674	19,380	5,123	2,349	99,526	92,49
2	Sambaliung	81,939	97,297	67,268	25,927	272,431	65,79
3	Gunung Tabur	64,891	80,842	32,558	28,734	207,025	70,39
4	Teluk Bayur	62,299	66,093	27,676	0,072	156,140	82,22
5	Segah	43,340	101,014	29,817	20,874	195,045	74,01
6	Pulau Derawan	15,301	15,757	1,018	24,124	56,200	55,26
7	Maratua	33,452	13,608	0,319	0,072	47,451	99,17
8	Kelay	23,454	57,902	32,590	30,158	144,104	56,45
9	Tabalar	11,996	31,011	31,087	4,445	78,539	54,75
10	Biatan	12,206	30,349	40,410	2,240	85,205	49,94
11	Talisayan	22,652	55,752	58,803	12,794	150,001	52,26
12	Batu Putih	29,404	24,523	24,724	4,297	82,948	65,01



13	Biduk-biduk	35,022	43,082	17,717	7,884	103,705	75,31
	Total Panjang (Km)	508,63	636,61	369,11	163,97	1678,32	893,05

Analisis Penyebab keberhasilan atau kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program-program yang telah ditetapkan baik program utama maupun program penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana secara optimal. Pemanfaatan dilaksanakan efektif dan efisien walaupun SDM yang tersedia masih terbatas dengan kemampuan yang terbatas, namun terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan maupun studi banding.
3. Memanfaatkan anggaran yang disediakan secara efektif dengan cara penyusunan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
4. Menyusun pedoman penilaian risiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melakukan sistem pengendalian intern Pemerintah secara sederhana.

Kegagalan:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum sesuai standar kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2024.
2. Kurangnya Sarana Prasarana yang terdapat pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Belum tertatanya sistem pengelolaan basis data dan aset dengan baik.
4. Terbatasnya anggaran yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan program sehingga perencanaan dan pelaksanaan fisik dilakukan secara bertahap.



5. Beberapa program terdapat permasalahan lokasi baik itu masalah pembebasan lahan ataupun bersinggungan dengan lahan KBK.

Solusi:-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 melakukan langkah langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, di mana Dinas secara langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Pelaksanaan setiap kinerja menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai secara keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis dan evaluasi Capaian Kinerja pada Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase penduduk berakses air minum (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Untuk indikator ini, yang terealisasi adalah sebesar 83,17 % dari 90 % capaian target kinerja yang direncanakan.
2. Indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Untuk indikator ini, yang terealisasi adalah sebesar 81,49% dari 87% capaian target kinerja yang direncanakan.
3. Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase) Untuk indikator ini, yang terealisasi adalah sebesar 42 % dari 38 % capaian target kinerja yang direncanakan.
4. Indikator Jumlah infrastruktur bangunan gedung yang terbangun dan ditingkatkan (Program Penataan Bangunan Gedung) 68 Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2024 Untuk indikator ini, yang terealisasi adalah sebesar 60 unit dari 92 unit capaian target kinerja yang direncanakan.

5. Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Program Penyelenggaraan Jalan) Untuk indikator ini, yang terealisasi adalah sebesar 69,97% dari 67,05% capaian target kinerja yang direncanakan.

12) Indikator Capaian akses air minum jaringan perpipaan

13) Indikator Capaian akses air minum layak

Cakupan kampung dalam mengakses air bersih merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga hal ini merupakan hal yang penting untuk dijadikan prioritas pembangunan di daerah maupun di pusat.

No.	Kecamatan	Jumlah Pelanggan			Air yang disalurkan (m3)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kelay	-	-	-	-	-	-
2	Talisayan	1.134	1.184	1.205	15.096	182.491	192.018
3	Tabalar	465	499	508	3.999	65.782	62.445
4	Biduk-biduk	113	113	112	572	-	-
5	Pulau Derawan	-	-	-	-	-	-
6	Maratua	-	-	-	-	-	-
7	Sambaliung	3.859	6.591	7.162	106.894	1.856.124	2.042.798
8	Tanjung Redeb	17.906	20.199	21.049	825.825	8.674.064	8.884.262
9	Gunug Tabur	2.330	4.332	4.580	73.856	1.105.774	1.300.568
10	Segah	683	756	771	13.770	109.618	106.633
11	Teluk Bayur	2.106	3.198	3.431	75.091	1.217.487	1.290.608
12	Batu Putih (Tembudan)	249	273	275	2.185	42.183	45.386
13	Biatan	178	311	381	1.776	52.897	77.566
	Total Keseluruhan	29.023	37.456	39.475	1.119.064	13.306.420	14.002.284

Sumber : Perumda Air Batiwakkal Maret 2025



14) Indikator Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	23	32,97	143,54

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hidup	persen	22,53	73,61	32,97

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hidup	persen	33	32,97	99%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hidup	persen	32,97	-	-

15) Indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik masih memakai data tahun yang lama karena untuk kewenangan telah di ambil oleh pihak provinsi Kalimantan timur sehingga program dan kegiatan tidak ada lagi di tingkat pemerintah daerah kabupaten berau. Data yang diperoleh dari UID Kalimantan Timur dan Kalimantan



Utara UP3 Berau jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Berau tahun 2024 adalah 96.187.

Pencapaian ini tidak lepas dari bantuan pihak swasta antara lain PT.Berau Coal, PT. Hutan Hijau Mas, PT. Tanjung Buyu Perkasa melalui program CSR. Pengembangan jaringan listrik oleh untuk pembangunan sarana dan prasarana yang nanti pada akhirnya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Adapun jumlah pelanggan listrik menurut Kecamatan di Kab. Berau Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

**Pelanggan Listrik menurut Kecamatan di Kab. Berau
Tahun 2019 – 2024**

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelay	153	406	431	436	7602
2	Talisayan	3.575	3.874	3.943	6.860	5861
3	Tabalar	470	809	883	974	1616
4	Biduk-biduk	1.355	1.462	1.656	1.758	1816
5	Pulau Derawan	1.610	515	524	553	3061
6	Maratua	732	757	770	813	1026
7	Sambaliung	9.608	7.291	7.421	7.833	7.098
8	Tanjung Redeb	23.123	44.895	45.694	48.223	48.602
9	Gunung Tabur	6.390	3.939	4.009	4.232	6.953
10	Segah	1.530	1.527	1.555	1.641	2.736
11	Teluk Bayur	10.068	5.375	5.471	5.775	6.118
12	Batu Putih	640	1.746	1.777	1.876	2.296
13	Biatan	1.038	1.034	1.053	1.111	1.402
	Total Keseluruhan	60.292	73.630	75.187	82.095	96.187

Sumber : UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UP3 Berau 2025



16) Indikator Rasio rumah layak huni

Hasil pengukuran capaian kinerja Rasio Rumah Layak Huni mencapai 105% dan termasuk predikat **“Baik Sekali”**.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,198	0,207	105%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,197	0,200	0,207

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,2	0,207	103%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,207	-	-

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Rasio rumah layak huni telah mencapai target bahkan melampaui target yaitu 0.207. Hal ini dihasilkan berkat kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dilaksanakannya program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan kegiatan pencegahan perumahan dan



kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan yaitu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha. Pada sub kegiatan tersebut dilaksanakan tersebar di 5 Kecamatan dan 15 Kelurahan/Kampung dengan total perbaikan rumah dengan dana APBD sebanyak 345 unit rumah.

Untuk memenuhi target sesuai Dokumen Rencana Strategis tahun 2021–2026, dimana target perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 300 unit setiap tahunnya, untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kementerian PUPR) di Samarinda untuk mendapat Kuota penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Berau.

Dari hasil koordinasi tersebut Kabupaten Berau mendapat kuota program BSPS sebanyak 345 unit rumah yang tersebar pada 24 Kampung/Kelurahan, Sedangkan dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kementerian PUPR) Kabupaten Berau mendapat kuota program BSPS sebanyak 150 unit rumah yang tersebar pada 10 Kampung/Kelurahan. Sehingga pada tahun 2024 terealisasi perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 495 Unit yang tersebar pada 8 Kecamatan, 30 Kampung / Kelurahan. Dengan jumlah tersebut maka target dapat terlampaui dan dapat menutupi kekurangan target ditahun-tahun sebelumnya.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Tersedianya Data Rumah Tidak layak Huni.
2. Adanya data dari kampung untuk bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Tersedianya dana yang cukup untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.



Kegagalan:

1. Tidak ada Kegiatan / Sub kegiatan yang mengakomodir adanya pendataan rumah tidak layak huni, sehingga data yang tersedia adalah data rumah tidak layak huni pada tahun 2020.
2. Data calon penerima dari usulan Pemerintah kampung belum tentu sesuai dengan syarat-syarat maupun ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup tinggi, tidak sebanding dengan APBD yang dialokasikan sesuai target yang ditetapkan pada renstra.

Solusi:

1. Melaksanakan pendataan rumah tidak layak huni pada lokasi yang dilaksanakan pendataan untuk kegiatan lain.
2. Membentuk Tim verifikasi untuk melakukan investigasi, verifikasi dan penilaian bagi calon penerima manfaat.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi maupun Balai Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk mendapatkan alokasi BSPS.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Melaksanakan Pendataan secara simultan dimana ketika melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana sekaligus melakukan pendataan RUTILAHU, sehingga walaupun tidak mendapatkan data RUTILAHU secara menyeluruh namun tetap mendapat data RUTILAHU pada wilayah yang dilaksanakan identifikasi.
2. Ketika Melakukan Verifikasi calon penerima manfaat bantuan stimulan perumahan swadaya atas usulan dari pemerintah kampung, disampaikan kriteria dan syarat-syarat bagi penerima BSPS.
3. Pengembangan aplikasi Sirap ULIN, adalah sistem informasi berbasis IT untuk melakukan usulan, verifikasi dan penerimaan data RUTILAHU secara *online*.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan:

1. Sesuai dengan program unggulan bupati yang ke 18, yaitu bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Adanya dukungan dari anggota DPRD yang mengalokasikan dana POKIR.

Kegagalan:

1. Kurangnya dukungan alokasi dana.
2. Usulan data penerima adalah konstituen dari pemberi pokir yang belum tentu memenuhi syarat sebagai penerima BSPS.

Solusi:

1. Mencari sumber dana selain dari APBD kabupaten dengan melaksanakan koordinasi ke Dinas PU Provinsi maupun Kementerian PUPR.
2. Melakukan koordinasi agar penerima BSPS harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

10. Sasaran “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan 2 (dua) indikator rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten dan indeks SPBE.

Rasio konektivitas antar wilayah kabupaten yang di dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada saat penginputan target dalam perencanaan ada kesalahan *inputan* data yaitu sebesar 65 yang seharusnya target 0,65. Sedangkan indikator SPBE ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,65	0,6	92%
18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,28	162%



Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,56	0,75	0,6
18	Indeks SPBE	indeks	1,97	2,02	2,28

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,75	0,6	80%
18	Indeks SPBE	indeks	1,6	2,28	152%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,6	-	-
18	Indeks SPBE	persen	2,28	-	-

17) Indikator Analisis rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten

Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten Berau mempunyai target 0,65 pada tahun 2024 dan terealisasi 0,6 dengan tingkat capaian sebesar 92%. Konektivitas antar wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang mantap dan berkualitas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Terlaksananya kegiatan pembangunan pelabuhan (Lanjutan) Teluk Sulaiman.
2. Terlaksananya kegiatan rehab dermaga Batu Putih



Kegagalan:

1. Tidak adanya pembangunan pelabuhan baru yang mana rehab dan pembangunan lanjutan menjadi prioritas di tahun 2024

Solusi:

1. Segera menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang belum rampung hingga dapat segera bisa beroperasi dengan baik.
2. Segera membuat perencanaan pembangunan pelabuhan / dermaga sesuai dengan kebutuhan dan rencana induk jaringan transportasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang tinggi. Meskipun begitu terlihat dari perbandingan bahwa belum adanya efisiensi penggunaan anggaran yang mana tingkat serapan anggaran lebih tinggi daripada capaian kinerja.

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

Kegagalan:

1. Ketidaksanggupan pihak penyedia untuk melaksanakan atau melanjutkan kegiatan dikarenakan terkendala di sumber daya pekerjaan (Waktu, Material, Mobilitas, dll)

Solusi:

1. Agar tahap mulai pekerjaan agar dapat dimulai lebih awal lagi sehingga dapat mengatasi kekurangan serta waktu yang tersedia lebih banyak.



18) Indikator Indeks SPBE

Capaian Indeks SPBE di Kabupaten Berau tahun 2024 dari target 1,4 dimana realisasinya 228 dengan capaian 162% hal ini telah melebihi dari target pada dokumen RPJMD. Indeks SPBE merupakan salah indikator dalam mengukur pelayanan melalui transformasi digital. Namun, Target 1,4 itu nilai yang sangat kurang dari standar pusat, maka dari itu perlu adanya revisi Renstra. Untuk mencapai indeks SPBE yang kategori cukup, baik, dan sangat baik kita harus memenuhi capaian 47 Indikator.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Keberhasilan:

1. Target yang ditentukan telah terlampaui.

Kegagalan:

1. Sistem informasi yang belum terintegrasi.
2. Kurangnya Aksesibilitas dan literasi digital.
3. Kurangnya Koordinasi antara pemangku kepentingan.
4. Kurangnya kompetensi SDM

Solusi:

1. Tim koordinasi agar lebih aktif untuk berkoordinasi
2. Sistem informasi agar dapat diintegrasikan
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan ditingkatkan
4. Peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan kompetensi SDM IT

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Layanan media arsip cetak yang rumit ke sistem digital yang lebih efisien dan terintegrasi.
2. SDM yang adaptif terhadap sistem dokumen digital

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan:



1. Dukungan dari pemangku kepentingan untuk secara bersama berkomitmen penuh untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut secara menyeluruh.
2. Dana yang tersedia.

Kegagalan: -

Solusi: -

Tujuan V Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Tujuan Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 3 (tiga) indikator sasaran :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
5. Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup	11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19) Hasil pengukuran indeks kualitas air
		20) Hasil pengukuran indeks kualitas udara
		21) Indeks kualitas tutupan lahan

11. Sasaran Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan 3 (tiga) indikator.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59	59,96	100,65%
20	Hasil pengukuran indkes kualitas udara	Indeks	86,27	91,61	106,18%
21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804	94,85	105,61%



Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	53,48	53,33	59,96
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	83,76	85,17	91,61
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	94,64	93,76	94,85

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,69	59,96	105%
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,47	91,61	106%
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	89,814	94,85	105,61%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	59,96	-	-
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	91,61	-	-
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	94,85	-	-



- 19) Indikator Hasil pengukuran indeks kualitas air
- 20) Indikator pengukuran indeks kualitas udara
- 21) Indeks kualitas tutup lahan

Pada capaian kinerja pada tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan target RPJMD dan Renstra dari 3 indikator, yang tidak mencapai target yaitu 2 indikator dan 1 indikator mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target yaitu hasil pengukuran indeks kualitas air dan hasil pengukuran indeks kualitas udara tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 56,96 (IKA) dan 91,61 (IKU). Tidak tercapainya indeks kualitas air dikarenakan tingginya curah hujan, tidak adanya serapan untuk air hujan, alih fungsi lahan sehingga menyebabkan parameter pada perhitungan indeks kualitas air menjadi meningkat seperti kekeruhan, fecal coli, BOD, dan COD. Sedangkan tidak tercapainya target indeks kualitas udara disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya kegiatan yang menimbulkan dampak emisi seperti perbaikan infrastruktur, dan kurangnya lahan untuk penghijauan. Dengan tidak tercapainya IKA dan IKU, maka hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup juga tidak mencapai target yang ditetapkan.

Indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 94,85 dari 89,814, hal ini disebabkan adanya penambahan tutupan lahan seluas 20 Ha yang dilaksanakan di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk di areal penggunaan lain (APL) oleh KPH Berau Pantai. Walaupun capaian Indek Tutupan Lahan melebihi target, namun masih ada emisi gas karbon yang perlu diturunkan, dan pada tahun 2024 tercatat 314.734 CO₂eq, dimana hal ini disebabkan terjadinya fenomena alam elnino sehingga mengakibatkan kebakaran di beberapa titik, peningkatan jumlah kendaraan juga menjadi penyumbang emisi gas karbon.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Tercapainya realisasi target capaian kinerja disebabkan SDM yang cukup kompeten di bidangnya meskipun dengan jumlah yang belum memadai.



2. Terkumpulnya data dukung yang representatif dari baik dari data primer maupun sekunder.
3. Adanya dukungan IT baik dari perangkat keras maupun lunak termasuk aplikasi dalam pengolahan data.

Kegagalan: -

Solusi: -

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Dengan jumlah SDM yang terbatas Program dan Kegiatan umumnya dilaksanakan secara baik, karena personil cukup kompeten dibidangnya.
2. Di beberapa sub kegiatan jumlah anggaran masih terbatas, namun masih bisa mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Peralatan/IT yang ada sudah cukup optimal digunakan dalam pencapaian target kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan:

1. Pada umumnya Program dan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang mencapai rata-rata di atas 90%. Jumlah anggaran sangat mendukung untuk tercapainya target indikator kinerja.
2. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan juga didukung dengan SDM yang cukup berkompeten di bidangnya.
3. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan juga didukung penggunaan IT dan peralatan secara optimal.
4. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan juga disebabkan adanya koordinasi dan sinkronisasi antar *stakeholder* terkait.

Kegagalan: -

Solusi: -



Misi IV : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel.

Tujuan VI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN

Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 4 (empat) indikator sasaran:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi	12.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22. Opini BPK
		23.Nilai/Predikat AKIP
		24. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab.Berau
	13. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25. Survei Kepuasan Masyarakat

12. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Kategori	68	62,74	92
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi (3,41)	Belum rilis (3,1964)	94



Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
22	Opini BPK	Opini	WTP*	WTP*	100*
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Kategori	61,62	62,40	62,74
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Sangat Tinggi*	3,1964	3,1964*

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	72	62,74	88
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab.Berau	Status	Tinggi (3,41)	3,1964*	94

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
22	Opini BPK	opini	WTP*	-	-
23	Kategori SAKIP Kab.Berau	Nilai/Kategori	62,74	-	-
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	3,1964*	-	-

22) Indikator Opini BPK

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian



dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga bagian yang terpenting dalam informasi birokrasi dan akuntabilitas. Hal ini diperlukan untuk peningkatan kinerja dalam membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi yang sesuai arahan dalam tata pemerintahan yang baik.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) WDP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*) Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan. (Sumber : bpk.go.id).

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terjadi pencapaian target 100% dari yang ditargetkan dan telah memenuhi target dari RPJMD Kabupaten Berau dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Hal ini menunjukkan pencapaian yang baik dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk tahun 2024 masih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Kalimantan Timur. Dalam mewujudkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperlukan kesungguhan dari seluruh entitas akuntansi yaitu semua Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan daerah sejak dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta dalam dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Dari tabel diatas bahwa terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi pemerintah Kabupaten Berau berhasil meraih predikat penilaian dari audit BPK dikategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini menunjukkan pencapaian yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan dan pelaporan serta aset pemerintah Kabupaten Berau. Ada beberapa faktor keberhasilan sehingga mendapatkan predikat WTP yaitu :

1. Kesesuaian antara target dengan realisasi baik dari sisi keuangan maupun *output* kegiatan perangkat daerah.
2. Penatausahaan keuangan dan aset perangkat daerah dilakukan secara tertib, benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Sarana dan prasarana pendukung kerja memadai. Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan keuangan dan aset pada perangkat daerah cukup memadai baik kuantitas maupun kualitas.
4. Pelaporan keuangan dan aset perangkat daerah disusun relatif tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan:

Laporan keuangan sampai penilaian WTP

Kegagalan:

Masih ada beberapa penilaian aset daerah yang penyelesaiannya tertunda sampai akhir 2024 karena masih proses tahap penilaian.

Solusi:

Penilaian dilanjutkan tahapannya dari awal tahun 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

Serapan anggaran pada program penunjang mencapai 88,73%

Kegagalan: -

Solusi: -

23) Indikator SAKIP Kab.Berau

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban setiap daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan atas anggaran yang telah digunakan. Sasaran kualitas akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel, transparan menuju *good governance*. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada asas keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.



Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur merupakan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menerangkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada atasannya atau pemberi amanah dan *stakeholder* lainnya yang diwujudkan dalam sebuah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan tentang manajemen kinerja sebuah Organisasi Perangkat Daerah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator sasaran Nilai/Predikat AKIP memperoleh predikat B atau dengan nilai 62,74 yang artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2 / unit kerja.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

Perubahan Bobot Penilaian :

No	Permenpan Nomor 88 Tahun 2021	
	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Kategori Nilai :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangar memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.



2	A	(Nilai >80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon4/pengawas/Sub koordinator).
3	BB	(Nilai >70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator
4	B	(Nilai>60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	(Nilai >50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	(Nilai>30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	(Nilai >0-30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja



			sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
--	--	--	--

Pada tahun 2024 evaluasi SAKIP Pemerintah berpedoman pada peraturan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini menitikberatkan pada **“perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja”**. Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,74 dengan predikat “B”, yaitu implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Per Komponen Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21,43	21,52	22,20	22,54
2	Pengukuran Kinerja	25	15,98	15,53	17,66	18,02
3	Pelaporan Kinerja	15	10,22	10,50	9,96	10,20
4	Evaluasi Internal	10	5,66	5,71	11,80	11,99
5	Capaian Kinerja	20	10,21	10,48	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,50	63,74	61,62	62,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B

Hasil Evaluasi Per Komponen Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,54
2	Pengukuran Kinerja	30	18,02
3	Pelaporan Kinerja	15	10,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,99
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B



Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan:

1. Pemerintah Kabupaten Berau telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mulai dari RPJMD yang dijabarkan dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja (PK) dan sebagian dokumen perencanaan perangkat daerah telah berkualitas baik.
2. Pemerintah kabupaten Berau dan PD telah pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja.
3. Hasil penilaian kinerja telah menjadi salah satu dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
4. Pemerintah Kabupaten Berau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat Pemda yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) maupun tingkat PD.

Kegagalan:

1. Terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*) dan cukup. Contohnya pada indikator kinerja “(1) Persentase terlaksananya administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD serta administrasi keuangan PD; (2) Persentase terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan; (3) Persentase terlaksananya penyampaian laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas” untuk sasaran “Meningkatnya manajemen dan tata kelola pendidikan dasar, PAUD, dan kesetaraan” pada Perjanjian Kepala Dinas Pendidikan.
2. Belum memiliki pohon kinerja tingkat pemerintah daerah dan beberapa PD belum memiliki pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 diantaranya yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.



3. Pohon kinerja yang telah disusun oleh beberapa PD belum teridentifikasi *Critical Succes Factor* (CSF) atau faktor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi. Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi yang ada saat ini dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja. Akibatnya, hubungan kinerja, strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum terbangun secara cukup contoh pada pohon kinerja Dinas Kesehatan.
4. Penetapan target pada PK tahun 2024 belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagaimana yang disampaikan dalam LKjIP tahun 2024. Contoh pada penetapan target PK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar” dengan indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik”.
5. Telah memiliki aplikasi E-SAKIP yang digunakan untuk manajemen kinerja, khususnya untuk monitoring dan evaluasi kinerja, namun aplikasi tersebut belum termanfaatkan dengan baik yaitu pada menu realisasi kinerja yang merupakan fitur untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tidak berisi data.
6. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level PD belum dilengkapi definisi operasional dan formulasi pengukuran serta sumber data contoh pada IKU Dinas Pendidikan. Masih terdapat PD yang belum menyusun laporan kinerja Tahun 2024 yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
7. Laporan kinerja pada tingkat PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hal tersebut terlihat pada laporan kinerja Badan Pendapat Daerah.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contoh hal ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



9. Ruang lingkup evaluasi internal yang dilakukan adalah evaluasi LKjIP bukan evaluasi atas implementasi SAKIP.
10. Evaluasi internal belum dilakukan kepada seluruh PD. Hal ini dibuktikan dengan hanya sebagian PD yang memiliki Laporan Hasil Evaluasi Internal. Contoh Pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
11. Belum seluruh PD yang dievaluasi menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat, contohnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Perkebunan.
12. Pemberian predikat internal belum mengikuti standar yang ada yaitu nilai diatas 70,01 masih mendapatkan predikat "B". Contohnya pada Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan bada Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Solusi :

1. Pimpinan Perangkat Daerah harus berperan langsung dalam proses Pengintegrasian mulai dari Perencanaan, Keuangan, Pelaporan sampai dengan evaluasi (SAKIP).
2. Melakukan reuiu dokumen perencanaan yang menjadi catatan dalam LHE AKIP Kab. Berau agar seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan cukup serta target kinerja yang ditetapkan lebih realistis.
3. Menyusun pohon kinerja Pemda dan menyempurnakan pohon kinerja perangkat daerah.
4. Melakukan *desk* penginputan aplikasi ESAKIP secara triwulan.
5. Memastikan seluruh dokumen IKU PD telah memuat definisi operasional dan formulasi pengukuran serta sumber data.
6. Memastikan seluruh perangkat daerah telah membuat laporan kinerja.
7. Melakukan evaluasi kinerja internal kepada seluruh Perangkat Daerah dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kementerian PANRB dan Perangkat Daerah bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perbaikan AKIP secara berkelanjutan pada setiap Perangkat Daerah



8. Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Perlu ada diklat atau Bimbingan Teknis untuk meningkatkan SDM ASN yang membidangi SAKIP baik Kabupaten maupun PD.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

1. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi didukung oleh anggaran untuk memfasilitasi perangkat daerah melaksanakan *benchmarking* penyusunan pohon kinerja, *cascading*, dan perjanjian kinerja perangkat daerah.

Kegagalan: -

Solusi: -

- 24) Indikator Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab.Berau

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menunjukkan capaian Sedang dengan skor 3,1964. Hasil evaluasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.



Capaian tahun 2024, masih dalam proses reviu. Namun capaian pada tahun 2023 capaian Status Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau adalah sedang (Skor 3,1964).

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan:

1. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) secara tepat waktu.

Kegagalan:

1. Pemenuhan data IKK yang kurang Optimal

Solusi:

1. Persamaan Persepsi dan penguatan Kapasitas Penyusun LPPD

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Efisiensi anggaran dilaksanakan terlihat dari penyerapan anggaran sebesar 76,81 % sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Efisiensi dilakukan sebagaimana amanat peraturan perundangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

1. Penyusunan LPPD didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur IKK yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Kegagalan:

1. Perubahan IKK sehingga masih terdapat IKK yang belum bisa dilaksanakan karena belum tertuang dalam DOKRENDA dan Penganggaran

Solusi:

1. Singkonisasi IKK dalam Dokrenda



Sasaran 13 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	94,06	85	90%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	90,12	92,16	85

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	98	85	86

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	85	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat kategori survei kepuasan masyarakat Kabupaten Berau untuk tahun 2024 yaitu 85. Dengan kategori B. Survei Kepuasan masyarakat tahun 2024 mengalami penurunan 7,16 dari tahun 2023 yaitu 92,16 dengan kategori A. Jika dilihat dari capaian kinerja terkait indikator survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Berau mana masuk dalam kategori B.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai abdi masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik



kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik.

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

❖ Perlu diketahui peraturan-peraturan yang mendasari tentang pelaksanaan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat.

❖ Selain itu ada perbedaan unsur pelayanan yang dimuat dalam setiap peraturan sehingga terjadi perubahan pengukuran nilai rata-rata dan ini sangat berpengaruh terhadap laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan Peraturan Kementerian PAN & RB terkait pedoman SKM

KEP/25/M.PAN/2/2004	Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014	Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017
1. Prosedur pelayanan	1. Persyaratan	1. Persyaratan
2. Persyaratan pelayanan	2. Prosedur	2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Kejelasan petugas pelayanan	3. Waktu Pelayanan	3. Waktu Penyelesaian
4. Kedisiplinan petugas pelayanan	4. Biaya/Tarif	4. Biaya/Tarif
5. Tanggung jawab petugas pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan	6. Kompetensi Pelaksana	6. Kompetensi Pelaksana



7. Kecepatan pelayanan	7. Perilaku Pelaksana	7. Perilaku Pelaksana
8. Keadilan mendapatkan pelayanan	8. Maklumat Pelayanan	8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Kesopanan dan keramahan petugas	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	10. Saran dan Prasarana
11. Kewajaran biaya pelayanan		
12. Kepastian biaya pelayanan		
13. Kepastian jadwal pelayanan		
14. Kenyamanan lingkungan		
15. Keamanan pelayanan		

Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 14 Tahun 2017

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25 -64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00 -76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 -3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324 -4,00	88,31 -100,00	A	Sangat Baik



Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan di setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat memuat dengan memuat 14 unsur pelayanan tetapi belum mengacu pada

- UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan.
- Ruang lingkup SKM belum selaras dengan Komponen Standar Pelayanan
- Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 81,26 – 100.00.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dengan memuat 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan tetapi dalam Peraturan ini belum :

- Mengatur teknis operasional pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
- Metode pengolahan data hasil survei belum ditentukan sehingga tidak ada keseragaman hasil survei
- Penentuan jumlah sampel responden belum diatur
- Hasil survei belum dipublikasikan
- Skor kepuasan masyarakat dalam kuantitatif dapat dikonversikan dalam bentuk kualitatif (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Buruk)

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 Unsur Pelayanan. Dalam Peraturan ini telah diatur antara lain

- Unsur Pelayanan ada memuat Saran dan Prasarana
- Penetapan responden menggunakan sampel Morgan dan Krejcie
- Analisa Tindak Lanjut Hasil Survei dan rencana tindak lanjut
- Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus di Publikasi
- Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 88,31 – 100.00 karena dibanding dengan interval peraturan sebelumnya hanya mencapai 81,26 – 100.00.



Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan:

1. Terdapat peningkatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah terutama pada unit pelayanan publik yang mana tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak melaksanakan survei
2. Pengumpulan data dan laporan survei kepuasan masyarakat Kabupaten Berau dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Kegagalan:

1. Terdapat perbedaan metode atau cara hitung nilai survei kepuasan masyarakat antar Perangkat Daerah sehingga menyebabkan kesalahan hitung nilai akhir pada beberapa perangkat daerah.
2. Laporan yang dibuat oleh perangkat daerah tidak lengkap/ tidak menyajikan pengolahan data hasil survei.
3. Mayoritas perangkat daerah tidak menyajikan nilai indeks konversi per unsur di dalam laporannya dimana data tersebut wajib ada sebagai bagian dari laporan survei kepuasan masyarakat Kab. Berau

Solusi:

1. Dilakukan pendampingan dan pembinaan secara intens pada seluruh perangkat daerah oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Berau
2. Dilakukan pendampingan dan pembinaan secara intens pada seluruh perangkat daerah oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Berau.
3. Dilakukan pendampingan dan pembinaan secara intens pada seluruh perangkat daerah oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Berau

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Membentuk tim penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat.
2. Memanfaatkan sistem *online* sebagai alat survei dan penyusunan laporan survei sehingga lebih efisien dan efektif



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan:

1. Terdapat anggaran pendukung pelaksanaan pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah.

Kegagalan:

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia

Solusi:

1. Pembentukan tim dan pembagian jadwal pembinaan dan pendampingan secara bertahap

3.5. Realisai Anggaran

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait efisiensi anggaran dengan capaian kinerja yang telah di targetkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024.

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	2024		Tingkat Efisiensi	OPD Penanggungjawab
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		
1	Harapan lama sekolah	92,39	89,35	3,04	Dinas Pendidikan
2	Rata-rata lama sekolah	95,89	89,35	6,54	
3	Angka harapan hidup	101,53	87,81	13,72	Dinas Kesehatan
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	150,15	100	50,15	
5	Tingkat Pengangguran terbuka	88	80	8	Disnakertrans
6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	97	92,27	4,73	Dinas Sosial
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	175	77	98	Diskoperindag



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj-IP)
Tahun 2024

8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	117	88,57	28,43	Disbudpar
9	Kontribusi Sektor Pertanian,	12,42	68,12	-55,70	Dinas Perkebunan
					Dinas perikanan
					DTPHP
10	Score pola pangan harapan	103,25	88,43	14,82	Dinas Pangan
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	103,66	95,26	8,40	DPUPR
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipa	696,5	97,53	598,97	
13	Capaian Akses Air Minum Layak	92,41	97,63	-5,22	
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	143,54	98,59	44,95	
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	99	Provinsi	-	
16	Rasio rumah layak huni	105	97,88	7,12	Disperkim
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	92	94,18	2,18	Dishub
18	Indeks SPBE	162	91,64	70,36	Diskominfo
19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	100,65	85,92	14,73	DLHK
20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	106,18	85,92	20,26	
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	105,61	85,92	19,69	
22	Opini BPK	100*	95,78	4,22	BPKAD
23	Nilai/Predikat AKIP	92	83,35	8,65	Bagian Organisasi
24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab.Berau	94	76,81	17,19	Bagian Tata Pemerintahan
25	Survei Kepuasan Masyarakat	90	59,44	30,56	Bagian Organisasi

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau secara keseluruhan tercapai secara maksimal dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Pada tahun 2024 target pendapatan daerah sebesar Rp. 6.107.982.827.838,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.194.026.383.086,08.



Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 303.864.396.033,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 343.480.236.165,39 atau terealisasi sebesar 113,04 %. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer anggaran sebesar Rp. 5.774.413.283.269,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.774.506.770.500,00 atau terealisasi sebesar 100%.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah masih bersifat sementara karena laporan realisasi masih dalam proses. Untuk laporan dalam bentuk tabel terlampir.



Anggaran dan Realisasi Sasaran dan Program

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Program Unggulan Bupati

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggaran
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		4. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK)	7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans



	dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	8.Program Hubungan Industrial	
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	9.Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	10.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		11.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		12.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	13.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		14.Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	15. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		16.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		17.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec.Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		19.Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop



11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	20.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		21.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		22.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	23.Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain- lain)	24.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) SertaMewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	25. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		26.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		27.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		28.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	29.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		30.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		31.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		32.Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
--	--	-------------------------------------	--------

Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
MISI KE 1							
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN BERBUDI LUHUR							
TUJUAN KE 1 Mewujudkan Masyarakat Berau yang Berdaya Saing							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	319.049.433.744,00	291.778.239.761,89	91	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	10.377.483.000,00	9.198.335.971,00	88	Dinas Pendidikan
Rata-rata Capaian							
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.699.158.532	114.616.383.115	88	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.338.980.999	3.175.466.438	95	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	810.000.000	510.209.120	63	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.122.948.000	1.968.572.459	93	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.834.330.140	3.535.907.559	86.10	Rsud Abdul Rivai
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.801.985.000	2.490.849.550	88,89	Rsud Abdul Rivai



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.328.804.700	3.042.529.919	91,40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian							
MISI KE 2 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN OPTIMALISASI SEKTOR HILIR SUMBER DAYAALAM DAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS YANG BERBASIS KERAKYATAN DENGAN PERLUASAN LAPANGANKERJA DAN PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL							
Tujuan Ke 2 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Yang Mantap Dan Berdaya Saing							
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.455.477.000	1.391.512.538	96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		11	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.276.615.200	1.228.903.427	96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12	Program Hubungan Industrial	3.640.863.600	2.871.918.294	79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rata-rata Capaian							
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Program Pemberdayaan Sosial	1.957.007.800	1.893.099.375	96,73	Dinas Sosial
		14	Program Rehabilitasi Sosial	9.265.000.483	8.776.030.184	94,72	Dinas Sosial
		15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.132.918.800	954.210.816	84,23	Dinas Sosial
		16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	4.398.555.300	3.852.092.697	87,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	68.273.277.988	51.725.198.774	75,76	Sekretariat Daerah Tapem dan Kesra
		18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	848.288.700	602.522.674	71,03	Kecamatan Tanjung Redeb
Tujuan Ke 3 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan							
Rata-rata Capaian							
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.748.996.000	1.347.971.416	77,1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		20	Program Pengembangan UMKM	1.600.000.000	1.243.835.000	77,73	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	360.000.000	326.420.700	90,67	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.367.265.200	8.831.276.775	94,28	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70.000.000	41.025.960	58,61	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	446.091.000	376.200.312	84,33	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata Capaian							
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	30.998.382.942	28.704.365.867,83	92,60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		26	Program Pemasaran Pariwisata	4.829.123.800	4.509.868.030,98	93,39	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.920.510.670	1.161.980.335	60,50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		28	Program Pengembangan Kebudayaan	5.185.679.600	3.879.599.460	74,81	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rata-rata Capaian							
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.263.219.800	1.704.671.253	75,32	Dinas Perkebunan
		30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	796.733.000	732.193.700	91,	Dinas Perkebunan
		31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.293.700.000	1.014.954.586	78,45	Dinas Perkebunan
		32	Program Perizinan Usaha Pertanian	1.308.013.000	394.837.415	30,19	Dinas Perkebunan
		33	Program Penyuluhan Pertanian	1.606.380.400	1.338.289.713	83,31	Dinas Perkebunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

		34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.915.206.600	8.654.565.874	87,29	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
		35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.363.423.500	2.079.103.334	87,97	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
		36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	332.898.000	244.783.488	73,53	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
		37	Program Perizinan Usaha Pertanian	334.362.000	240.703.076	71,99	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
		38	Program Penyuluhan Pertanian	1.619.399.600	1.292.294.668	79,80	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
		39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.428.896.200	4.881.417.514	89,92	Dinas Perikanan
		40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.221.905.850	4.668.415.364	89,40	Dinas Perikanan
		41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.988.245.647	1.887.661.611	94,94	Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian							
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	502.465.000	319.790.470	63,64	Dinas Pangan
		43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.249.147.500	3.042.043.608	93,63	Dinas Pangan
		44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	919.062.500	828.198.043	90,11	Dinas Pangan
MISI KE 3 MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG BERKUALITAS, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
Tujuan 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah							
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	510.222.194.396	486.818.654.476	95,41	DPUPR
		46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	213.763.577.782	208.488.297.735	97,53	DPUPR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

			Penyediaan Air Minum				
		47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	539.301.787.541	523.711.962.030	97,11	DPUPR
		48	Program Penataan Bangunan Gedung	428.499.379.199	329.683.070.845	76,94	DPUPR
		49	Program Penyelenggaraan Jalan	1.947.701.349.353	1.855.447.060.732	95,26	DPUPR
		50	Program Pengembangan Perumahan	411.890.000,00	403.161.694,50	97,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		51	Program Kawasan Permukiman	3.868.175.999,00	3.364.587.869,00	86,98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		52	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	9.833.000.000,00	9.780.666.189,50	99,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	33.156.799.500,00	32.349.772.503,00	97,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	18.742.503.200	2.123.349.431	11,33	Dinas Pertanahan
Rata-rata Capaian							
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	55	Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	102.569.998.980	99.135.537.038	96,65	Dinas Perhubungan
		56	Program Pengelolaan Pelayaran	24.859.935.294	22.185.734.044	89,24	Dinas Perhubungan
		57	Program Aplikasi Informatika	17.832.951.300	16.342.518.808	91,64	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 5 Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup							
Rata-rata Capaian							
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	58	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.791.564.100	4.039.731.759	84,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah	298.198.000	255.825.150	85,79	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

			Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				
		60	Program Pengelolaan Persampahan	15.880.794.980	14.912.841.262	93,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Rata-rata Capaian							
MISI KE 4							
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL							
Tujuan 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi							
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	61	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	496.103.186.875	477.541.162.879	96,26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.372.514.200	7.749.512.142	82,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.052.434.700	5.416.938.171	89,50	Badan Pendapatan Daerah
		64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	750.000.000	740.757.317	98,77	Badan Pendapatan Daerah
		65	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.359.846.800	4.101.626.667	94,08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		66	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.680.090.400	4.294.608.028	91,76	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		67	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.860.487.980	3.907.555.403	80,39	Inspektorat
		68	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.108.587.400	1.731.687.201	82,12	Inspektorat
		69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	44.346.905.426	31.556.554.884	71,2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
		70	Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85.341.943.928	75.362.196.582	88,31	Sekretariat Daerah
		71	Program Penataan Desa	471.544.000	261.582.626	55,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau (LKj – IP) Tahun 2024

Rata-rata Capaian							
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	72	Program Kepegawaian Daerah	6.147.046.800	5.562.987.714	90,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.174.088.000	7.395.234.775	90,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		74	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.999.800	144.002.856	67,93	Kecamatan Tanjung Redeb
		75	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.998.000	13.239.000	37,83	Kecamatan Tanjung Redeb
		76	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.732.599.000	3.986.691.510	84,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata-rata Capaian							



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Berau ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut:

5. **Misi Pertama;** yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (indikator) indikator kinerja dengan capaian persentase rata-rata sebesar 109,99 persen yang telah dicapai dalam tahun 2024. Dengan capaian kinerja memperoleh nilai/predikat sangat baik.
6. **Misi Kedua;** yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal dengan menetapkan 2 (dua) Tujuan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024. Dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik. Dengan nilai capaian persentase rata-rata adalah 114,04 persen.



7. **Misi Ketiga** ; yaitu Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan telah ditetapkan 2 (dua) tujuan 3 (tiga) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian persentase rata-rata adalah 164,23 persen.
8. **Misi Keempat** ; yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian persentase rata-rata adalah 93,75 persen. Akan tetapi ada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang di inginkan dengan capaian rata – rata 100%, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Berau.

Adapun beberapa indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% pada tahun-tahun berikutnya akan diupayakan perbaikan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau.

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis.